

**PERNYATAAN PERS TAHUNAN**  
**MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
**Jakarta, 19 Januari 2005**

**I. TINJAUAN UMUM**

1. Isu-isu politik, keamanan dan ekonomi global yang mewarnai hubungan internasional dalam kurun waktu 2004 sebagian masih dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya masalah Irak, Palestina, isu-isu terorisme, HAM, masalah tenaga kerja dan liberalisasi perdagangan. Namun, di penghujung tahun dunia diprihatinkan dengan peristiwa bencana alam gempa bumi disertai gelombang badai Tsunami, khususnya di wilayah Asia yang telah merenggut lebih dari 150 ribu jiwa, termasuk di Indonesia.
2. Diantara negara-negara yang dilanda musibah, Indonesia paling parah menderita akibat bencana tersebut. Peristiwa ini telah menarik simpati dan dukungan masyarakat nasional maupun internasional, termasuk PBB, Amerika Serikat, Australia, Filipina, Iran, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Qatar, Republik Rakyat Cina, Saudi Arabia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Taiwan, Tunisia, Rusia, Ceko, Polandia, Ukraina, Bulgaria, Rumania, Hongaria dan Uni Eropa untuk memberikan bantuan kepada Indonesia. Bantuan juga datang dari masyarakat lembaga-lembaga non-pemerintah.
3. Dilandasi pemikiran perlunya mengkoordinasikan pemberian bantuan tersebut, Indonesia memprakarsai pertemuan khusus kepala-kepala negara ASEAN plus mitra wicara, negara-negara yang tertimpa bencana dan negara-negara lain maupun lembaga-lembaga donor serta badan-badan PBB. Pertemuan yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005 itu, antara lain membahas bantuan untuk keperluan tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah-wilayah yang tertimpa bencana serta kemungkinan membangun suatu sistem pencegahan dini (early warning system) di negara-negara kawasan rawan bencana.
4. Dalam tahun 2004 yang sebagian besar waktu masih dalam masa pemerintahan Kabinet Gotong-Royong, diplomasi Indonesia telah mencapai sasaran-sasaran penting dalam hubungan luar negeri, misalnya untuk memagari potensi disintegrasi bangsa, memperkuat bangunan lingkaran konsentris kerjasama kawasan yang bertumpu pada ASEAN sebagai pilar utama dimana Indonesia mampu bangkit kembali sebagai pemimpin yang lebih percaya diri, meningkatkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri termasuk TKI, mengembangkan diplomasi publik yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam total diplomacy, serta mendukung upaya pemulihan citra nasional dan pembangunan ekonomi.
5. Capaian-capaian tersebut berjalan seiring dengan keberhasilan proses internal di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam rangka benah diri dan pembinaan profesi yang diperlukan bagi penyempurnaan mesin diplomasi.
6. Pergantian pemerintahan pada triwulan akhir tahun 2004, yang melahirkan Kabinet Indonesia Bersatu memprioritaskan agenda pada lima sasaran, yaitu untuk mewujudkan

Indonesia yang lebih aman dan damai, lebih adil, lebih demokratis, lebih sejahtera dan mengembangkan kerjasama internasional. Hal ini telah menuntut pula langkah-langkah penajaman prioritas kerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI yang tetap memiliki pula dimensi kesinambungan program. Untuk itu telah diselenggarakan pula rapat kerja Deplu dan Kepala Perwakilan RI pada tanggal 13 – 17 Desember 2004.

7. Upaya-upaya terpadu dan sistematis yang dilakukan dalam rangka memagari potensi distintegrasi melalui berbagai jalur telah menghasilkan dukungan banyak pihak terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional Indonesia. Disisi lain, Deplu terus mengupayakan langkah-langkah untuk menghadapi perubahan pendekatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-separatisme di Papua dewasa ini yang lebih mengedepankan isu pelanggaran HAM oleh Pemri dan menginternasionalisasikan isu-isu Papua dengan memanfaatkan tokoh-tokoh asli Papua serta figur internasional. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain: melakukan pendekatan secara aktif dengan individu/organisasi internasional untuk memberikan penjelasan mengenai status Papua dan kesungguhan Indonesia melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan di propinsi tersebut. Deplu juga menyampaikan concern RI dan pressure kepada Pacific Island Forum (PIF), UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) dan Bank Dunia. Di dalam negeri, dalam upaya mengembangkan diplomasi publik, memberikan informasi tentang perkembangan terkini yang terkait dengan Papua kepada kalangan civitas akademika di tanah air dalam berbagai kesempatan kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia. Informasi disampaikan pula kepada perwakilan-perwakilan RI di luar negeri sebagai bahan penerangan umum ke kalangan masyarakat setempat.
8. Sementara itu, upaya penegakan kedaulatan RI di Propinsi Aceh telah mencapai kemajuan dengan adanya perubahan sikap Pemerintah Swedia yang telah memungkinkan bergulirnya proses tuntutan hukum Pemerintah RI terhadap pemimpin GAM Hasan Tiro dkk. Pemri terus melakukan komunikasi secara intensif dengan pemerintah Swedia maupun Kejaksaan Stockholm dalam pelaksanaan proses hukum tersebut. Bencana akhir tahun di Aceh diharapkan menjadi hikmah dan momentum yang memudahkan upaya penyelesaian masalah Aceh secara tuntas.
9. Masalah terorisme di tahun 2004 masih merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat internasional. Indonesia merupakan salah satu sasaran tindakan terorisme. Setelah peristiwa yang mengguncang dunia dengan aksi terorisme di Bali pada bulan Oktober 2002 dan di Hotel Marriott Jakarta pada bulan Agustus 2003, Indonesia pada tahun 2004 kembali menjadi sasaran aksi terorisme yang terjadi di Jl. Kuningan, Jakarta dan menewaskan 9 korban jiwa. Terorisme merupakan suatu ancaman yang harus dilawan, tidak hanya dengan menangkap dan menindak para pelakunya sesuai hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Indonesia, namun juga dengan memerangi terorisme hingga ke akar-akarnya.
10. Sehubungan dengan upaya memerangi tindak kejahatan terorisme, Indonesia melaksanakan langkah memperkuat kelembagaan hukum, memberdayakan kelompok moderat dan melakukan berbagai kerjasama counter terrorism dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral. Dalam kerangka bilateral, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, khususnya dalam Capacity Building

Kepolisian RI, dengan Kanada (pelatihan aparat keamanan untuk ancaman bio-terrorism), Belanda dan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Dalam tingkat regional Indonesia berperan aktif dalam penyelenggaraan Bali Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism di Bali pada bulan maret 2004 yang menyepakati dibentuknya The Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang disambut baik dan mendapatkan dukungan di negara UE yang disampaikan pada KTT ASEAN V, inisiatif Indonesia berupa ASEM Interfaith Dialogue juga mendapatkan sambutan positif. Dalam kerangka APEC Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini bahkan telah ditunjuk sebagai Ketua APEC Counter Terrorism Task Force (CTTF).

11. Sementara di tingkat Internasional, Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyelenggarakan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Jakarta, tanggal 23-25 Februari 2004. Konperensi mengambil tema: "Meneguhkan Kembali Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin" dan dihadiri oleh 245 Cendekiawan Islam dari 41 negara di kawasan Asia, Afrika, Australia, Amerika dan Eropa. Konperensi bertujuan mengembangkan dan mengaktualisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin serta membangun rasa saling percaya, pengertian dan penghormatan antara Islam dan dunia lain, khususnya Barat. Selain itu, konperensi juga dimaksudkan untuk meningkatkan dialog yang konstruktif dan kerjasama diantara lembaga-lembaga dan masyarakat Islam dari seluruh kawasan. Konperensi menghasilkan dua dokumen utama, yaitu : (i) Deklarasi Jakarta yang berisi pernyataan yang meneguhkan prinsip dan nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin dan (ii) Rencana Aksi yang memuat kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan, ekonomi dan iptek, informasi dan media serta pendidikan dalam 2 (dua) tahun ke depan.
12. Departemen Luar Negeri berpandangan bahwa kata kunci untuk memerangi terorisme adalah Empowering the Moderates dan salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan "Dialogue on Interfaith Cooperation: Community Building & Harmony" yang dilangsungkan di Yogyakarta tanggal 6-7 Desember 2004 bekerjasama dengan DFAT dan PP Muhammadiyah yang dihadiri oleh para tokoh agama dari kawasan Asia dan Pasifik dan diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama di kawasan regional, meningkatkan rasa dan pengertian antara Islam sebagai agama yang dominan di Indonesia dengan agama lainnya.
13. Indonesia senantiasa memandang penting kerjasama ASEAN baik bagi pencapaian kepentingan nasional, maupun regional, bahkan global. Kerjasama ASEAN selama ini tidak hanya meliputi bidang politik dan keamanan, namun juga bidang ekonomi, serta sosial budaya. Di tahun 2004, kerjasama ASEAN telah mencatat beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam pembahasan lebih lanjut mengenai gagasan ASEAN Community yang terdiri dari tiga pilar. Konsep ASEAN Community semakin memperoleh momentum ketika Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-37 yang diselenggarakan di Jakarta menyepakati secara konsensus konsep Plan of Action dari ASEAN Security Community (ASC PoA) dan ASEAN Socio-cultural Community (ASsC PoA). Kedua konsep tersebut telah disahkan oleh para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, pada bulan November 2004. Dengan disepakatinya ASC-PoA maka ASEAN kini dapat lebih mengembangkan kerjasama di bidang politik dan keamanan. Disepakatinya ASC PoA ini

juga menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam memimpin proses perumusan selama setahun terakhir sesuai mandat KTT ASEAN ke-9 di Bali.

14. ASEAN juga meraih keberhasilan diplomasi dalam upaya meningkatkan perdamaian dan keamanan Asia Tenggara maupun wilayah sekitarnya. Hal tersebut tercermin dengan bertambahnya negara-negara di luar kawasan ASEAN yang telah menandatangani Treaty of Amity and Cooperation. Republik Korea dan Federasi Rusia telah mengaksesi TAC masing-masing pada tanggal 27 November dan 29 November 2004, menyusul lima negara di luar kawasan yang telah mengaksesi TAC sebelumnya. Penandatanganan instrument TAC tersebut menunjukkan pengakuan dan keterikatan negara-negara di luar kawasan terhadap TAC sebagai tata perilaku hubungan damai dan bersahabat antar negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN saat ini mendorong agar Australia dan Selandia Baru dapat pula mengaksesi TAC tersebut.
15. Kerjasama ASEAN dengan para mitra wicaranya juga semakin meningkat di berbagai bidang. Di bidang perdamaian dan keamanan, antara lain, telah disepakati Joint Declaration for Cooperation to Combat Terrorism antara ASEAN dengan Jepang, dan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity. Di bidang ekonomi, pada rangkaian KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, telah disepakati Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation dan Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation antara ASEAN dan China yang menegaskan tekad untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China pada tahun 2012. Pada KTT ASEAN ke-10 juga dicapai konsensus untuk menyelenggarakan KTT Asia Timur (East Asia Summit) di Kuala Lumpur pada tahun 2005. Namun sesuai pandangan Indonesia, para kepala negara sepakat bahwa masih diperlukan pemahaman bersama mengenai East Asia Summit dan oleh karena itu KTT menugaskan para Menlu untuk mendiskusikan modalitas East Asia Summit tersebut.
16. Situasi di Timur Tengah, meskipun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, masih diwarnai konflik antar kelompok maupun antar-negara. Di Irak, penyerahan kedaulatan (transfer of sovereignty) dari Coalition of Provisional Authority (CPA) bentukan AS kepada Pemerintah Sementara Irak pada bulan Juli 2004 belum menjamin terciptanya stabilitas dan keamanan di Irak dan sekitarnya. Kontak senjata antara Pemerintah Irak dan pasukan pemberontak masih terus berlangsung. Pemerintah RI memprihatinkan peristiwa serangan besar-besaran pasukan gabungan AS dan Pemerintah Irak pada bulan Nopember 2004 terhadap kota Fallujah yang menambah jatuhnya korban jiwa di kalangan rakyat sipil Irak. Di sisi lain, Pemri menyambut baik penyerahan kedaulatan dari CPA kepada Pemerintahan Sementara Irak dan Resolusi DK PBB No. 1546 (2004) berkaitan dengan penyerahan kedaulatan tersebut. Indonesia dan masyarakat internasional mengharapkan hal itu dapat menjadi tahapan kearah terselenggaranya pemilu Irak yang demokratis dan terbentuknya suatu pemerintah Irak yang representatif dan *legitimate*. Indonesia juga terus mencermati implementasi Resolusi tersebut, khususnya yang menyangkut otoritas berdaulat Irak atas kehadiran pasukan multi-nasional, pentahapan waktu yang direncanakan untuk transisi politik di Irak dan wujud efektif peranan inti PBB dalam membantu rakyat dan pemerintah Irak.

17. Konflik Palestina-Israel telah mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan, khususnya dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap tokoh pimpinan Hamas oleh Israel dan kebijakan Pemerintah Israel membangun tembok pemisah, yang menyebabkan peningkatan ketegangan antara kedua pihak dan semakin tidak menentunya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Mahkamah Internasional dengan ketetapannya, yang diperkuat dengan Resolusi Majelis Umum PBB, telah menyatakan bahwa tembok pemisah tersebut ilegal dan harus dibongkar, namun Israel tidak memperdulikan tekanan internasional tersebut.
18. Peristiwa wafatnya Presiden Palestina Yasser Arafat tanggal 11 November 2004 telah menimbulkan harapan namun juga kekhawatiran akan nasib perjuangan bangsa Palestina selanjutnya. Sebagai ungkapan duka cita yang mendalam dan dukungan bangsa Indonesia terhadap perjuangan Palestina, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Ketua MPR, Ketua DPR dan tokoh-tokoh Islam telah ikut menghadiri upacara penghormatan terakhir Yasser Arafat di Kairo, Mesir. Pemri mengharapkan proses perdamaian Palestina-Israel di dalam kerangka Peta Jalan Perdamaian (Road Map) dapat dilanjutkan dengan hasil akhir berdirinya Negara Palestina.
19. Hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste juga semakin menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2004, Kepala negara kedua negara telah mengadakan pertemuan baik ketika Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri maupun pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia dan Timor Leste sepakat bahwa penyelesaian masalah residual insiden tahun 1999 diselesaikan melalui proses nasional di Indonesia dan Timor Leste. Hal tersebut diperkuat dengan pembentukan Commission of Truth and Friendship oleh kedua negara, sehingga kedua negara tidak memandang perlu dibentuknya Commission of Experts usulan Sekjen PBB.
20. Dalam kerangka kerjasama Regional di Kawasan Asia Pasifik, Indonesia telah menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Regional Forum (ARF) ke -11 di Jakarta yang menghasilkan dua dokumen yaitu ARF Statement on Strengthening Transport Security Against International Terrorism dan ARF Statement on Non-proliferation. Penyelenggaraan PTM ini menunjukkan prestasi Indonesia sebagai Ketua ARF, antara lain dengan mampu menghadirkan Menlu Korea Utara.
21. Di sub-kawasan Pasifik Barat Daya telah makin mantap bangunan tiga struktur hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara di sub-kawasan tersebut. Pertama, Konsultasi Segitiga (Tripartite Consultation) antara Indonesia, Australia dan Timor Leste. Kedua, partisipasi Indonesia sebagai mitra wicara dalam Pacific Islands Forum (PIF). Ketiga, pembentukan program-program kerjasama South West Pacific Dialogue (SwPD), yang mengikutsertakan Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru dan Timor Leste. Untuk meningkatkan dialog dan people-to-people contact di kawasan Pasifik Barat Daya, Indonesia telah memberikan dua kali program beasiswa seni dan budaya bagi para peserta dari negara-negara SwPD. Pertemuan SwPD di Victoria Harbor, Australia, pada tanggal 3 Desember 2004 telah memperkuat fundasi dan komitmen kerjasama di sub-kawasan tersebut.
22. Indonesia terus meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Afrika. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan tersebut

tercermin dalam kunjungan para pejabat tinggi. Pada tahun 2004 Indonesia menerima kunjungan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Madagaskar, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mozambique, Menteri Luar Negeri Tanzania, dan kunjungan pribadi Presiden Zimbabwe serta kunjungan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan. Sementara Menlu RI telah berkunjung ke Mozambique, Zimbabwe dan Swaziland; dalam kunjungan tersebut ketiga negara telah menyatakan dukungannya secara tertulis bagi pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB Periode 2007-2008.

23. Indonesia juga berperan aktif dalam AASROC II di Durban, Afrika Selatan yang dihadiri oleh 81 negara Asia dan Afrika serta 5 organisasi Regional kedua benua. Pertemuan tersebut mendukung penyelenggaraan KTT Asia-Afrika pada tanggal 21-22 April 2005 di Bandung. Dalam rangka penyelenggaraan kedua acara tersebut, Indonesia selaku tuan rumah telah melakukan persiapan-persiapan baik fisik dan non fisik.
24. Hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa semakin diperkokoh. Selain di bidang keamanan seperti upaya mengatasi ancaman terorisme, kerjasama juga menyangkut bidang ekonomi. Hubungan bilateral Indonesia – Inggris pada tahun 2004 ditandai dengan dimulainya kembali kerjasama militer Pemerintah Inggris dan Indonesia. Pemerintah Inggris menerima usulan Indonesia untuk melakukan Amandemen terhadap persetujuan RI-Inggris di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan pada saat pertemuan bilateral RI-Inggris bulan Juni 2004.
25. Salah satu perkembangan positif kerjasama bilateral Indonesia dengan Uni Eropa (UE) pada tahun 2004, telah ditandatangani tiga Financing Agreement (FA), yaitu untuk proyek Good Governance in the Indonesian Judiciary, dalam kerangka pelaksanaan National Indicative Programme 2002 – 2004. Pada tanggal 20 Juli 2004, Deplu RI dan Delegasi Komisi Eropa di Jakarta telah menandatangani Memorandum of Understanding on National Indicative Program for Indonesia for 2005-2006 dengan jumlah hibah sebesar 72 juta Euro.
26. Indonesia terus berupaya meningkatkan dan memperkuat kerjasama di tingkat global di berbagai forum multilateral khususnya PBB. Saat ini muncul kecenderungan meningkatnya gejala unilateralisme dan menurunnya semangat multilateralisme dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia tetap mendukung penegakan multilateralisme terutama melalui kerangka PBB dalam menyikapi persoalan-persoalan dunia. Indonesia mendukung dan terlibat secara aktif dalam proses reformasi PBB, khususnya proses reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB dengan tujuan agar badan tersebut lebih merefleksikan situasi dunia pada saat ini. Dalam kerangka reformasi tersebut, Indonesia telah mengindikasikan pencalonannya sebagai anggota tetap DK PBB, disamping berupaya memperoleh kursi keanggotaan Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode 2007-2008 yang pembahasannya akan dilaksanakan pada tahun 2006. Terciptanya reformasi tentunya akan menjadikan PBB lebih responsif dalam menangani masalah-masalah global seperti penegakan HAM, pemberantasan terorisme internasional, perang terhadap kejahatan transnasional dan lain-lain.
27. Pemri juga terus berupaya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan melalui kerangka kerjasama multilateral. Indonesia telah melakukan pertemuan dengan negara-negara donor CGI di Jakarta pada tanggal 2 Juni

2004 yang dihadiri oleh 30 wakil dari pihak donor. Dalam pertemuan tersebut pihak donor telah menegaskan kembali komitmen untuk menyediakan bantuan bagi Indonesia untuk Tahun Anggaran 2005 guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Pledge bantuan tersebut disampaikan secara formal pada Pertemuan CGI ke-14 pada bulan Januari 2005 di Jakarta.

28. Indonesia terus meningkatkan kerjasama melalui kerangka Gerakan Non Blok guna mengatasi kecenderungan kurangnya perhatian masyarakat internasional terhadap masalah-masalah seperti pembangunan, kemiskinan, dan penghapusan hutang, serta kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Indonesia dan negara-negara anggota GNB melalui KTM GNB di Durban pada bulan Agustus 2004 meminta agar dunia memperhatikan upaya multilateralisme di bidang ekonomi agar kondusif bagi terciptanya pemerataan kesempatan dan mengutamakan implementasi hasil konferensi utama PBB di bidang ekonomi dan sosial.
29. Indonesia juga menyambut baik disahkannya Program Kerja Doha, sebagai Keputusan Dewan Umum WTO bulan Juli 2004, yang menyepakati kerangka perundingan isu-isu utama yang telah menghidupkan kembali perundingan Putaran Doha. Keputusan Juli 2004 telah mendorong perhatian yang lebih besar dari negara-negara maju kepada isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam kerjasama multilateral lain, baik dalam kerangka PBB, seperti UNEP, UN-ESCAP, UNCTAD, maupun non-PBB, seperti D-8 dan Kelompok G-15.
30. Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI, khususnya Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah menerapkan kebijakan *multi-pronged approach*, yaitu internal, bilateral dan regional serta multilateral. Dalam rangka pendekatan internal, Deplu bekerjasama dengan instansi terkait melakukan langkah-langkah upaya perbaikan sistem rekrutmen, pengiriman dan penempatan TKI di luar negeri. Deplu memberikan masukan-masukan berdasarkan kenyataan kasus-kasus yang menimpa TKI di luar negeri yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan pada sistem tersebut, dan memberi penerangan mengenai perlunya WNI/TKI melaporkan kedatangan dan keberadaannya ke Perwakilan RI setempat. Deplu juga berperan aktif dalam penyusunan UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan produk-produk hukum lainnya. Masukan-masukan Deplu termasuk berdasarkan kajian terhadap konvensi-konvensi utama ILO dan lainnya. Di tingkat bilateral, Pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral/MOU mengenai tenaga kerja dengan Malaysia, Kuwait, Yordania dan Korea Selatan. Pada tingkat multilateral, bulan September 2004 pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Protection of Migrant Workers and their Families* yang diharapkan diratifikasi pada tahun 2005.
31. Keberhasilan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Langsung Presiden 2004 yang damai dan demokratis semakin memantapkan Indonesia sebagai negara demokratis ketiga terbesar dunia dan menjadi aset yang dapat mendukung peningkatan citra Indonesia di dunia internasional. Berkaitan dengan pemilu 2004, Departemen Luar Negeri ikut berperan dalam memfasilitasi bantuan internasional untuk penyelenggaraan pemilu dan salah satu hasilnya adalah penandatanganan MoU pada tanggal 25 Agustus 2004 mengenai bantuan

luar negeri antara Indonesia dengan UNDP sebagai Coordinating Agency bantuan luar negeri bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia.

## II. PERKEMBANGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI TAHUN 2004

### A. KERJASAMA ASEAN

32. Kerjasama ASEAN selama tahun 2004 telah menunjukkan bahwa negara-negara anggota semakin siap menuju Komunitas ASEAN. Pada tahun tersebut diselenggarakan berbagai pertemuan yang mencapai puncaknya pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, pada 29-30 November 2004. Hubungan ASEAN dengan negara-negara mitra wicara juga semakin menguat dengan ditandatanganinya Treaty of Amity and Cooperation (TAC) oleh beberapa Negara Mitra Wicara.
33. Dalam masa Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN Standing Committee (ASC) di tahun 2003-2004, Indonesia telah menyelenggarakan dan menyetujui rangkaian Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM), Post Ministerial Conference (PMC), dan ASEAN Regional Forum pada tanggal 29 Juni - 2 Juli 2004. Pembahasan AMM ke-37 dititikberatkan pada tindak lanjut KTT ASEAN ke-9 pada bulan Oktober 2003 di Bali, khususnya mengenai ASEAN Security Community Plan of Action (ASC-PoA) dan ASEAN Socio-cultural Community Plan of Action (AScC-PoA). Pada AMM ke-37 dan pada Pertemuan Informal AMM di New York September 2004, para Menteri Luar Negeri ASEAN menyepakati masing-masing konsep Plan of Action secara konsensus, dan merekomendasikan pengesahannya oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, bulan November 2004.
34. Sementara itu, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan para mitra wicaranya (PMC) dilakukan dengan format baru, yaitu hanya dihadiri oleh Australia, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Uni Eropa dan Rusia. Sementara pertemuan tingkat Menlu ASEAN dengan China, Jepang, Republik Korea dan India diselenggarakan menjelang KTT ASEAN. Hasil penting dari rangkaian pertemuan tersebut adalah ditandatanganinya *ASEAN-Australia Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* dan *ASEAN-Russian Federation Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*.
35. Berkenaan dengan masalah politik-keamanan, *ASEAN Inter-Parliamentary Organization* (AIPO) menyelenggarakan Sidang Umum di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 12-17 September 2004. Dalam Sidang Komite Politik, secara khusus dibahas beberapa isu mengemuka yang berkaitan dengan politik-keamanan di kawasan, seperti Komunitas Keamanan ASEAN, ASEM dan *Energy Security*. Sidang menyambut baik diterimanya ASC-PoA oleh AMM ke-37 di Jakarta tanggal 2 Juli 2004 dan sepakat bahwa ASC-PoA dapat meningkatkan kerjasama politik-keamanan guna mengimbangi kemajuan kerjasama di bidang ekonomi. ASC-PoA menunjukkan tingkat kedewasaan dari negara anggota ASEAN karena mekanisme resolusi konflik dapat diimplementasikan berdasarkan prinsip "*we-feeling*" ASEAN sebagai suatu komunitas bangsa-bangsa. Komite Politik berhasil menyepakati 4 (empat) resolusi bidang politik, di antaranya *Resolution on the ASEAN Security Community*.

36. KTT ASEAN ke-10 yang diadakan di Vientiane, Laos, 29-30 November 2004, merupakan suatu peristiwa penting karena konsep *ASEAN Community* yang digulirkan Indonesia pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 menjadi lengkap dengan disahkannya ASC-PoA dan AScC-PoA. ASC-PoA dan AScC-PoA merupakan dua dari tiga pilar *ASEAN Community* (Bali Concord II). Pilar lainnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN yang *Plan of Action*-nya telah lebih dulu disepakati pada KTT ASEAN di Bali. Sesuai mandat dari KTT ASEAN ke-9 di Bali, selama satu tahun terakhir ini Indonesia telah memimpin proses perumusan ASC-PoA, sedangkan Filipina mengkoordinasikan perumusan AScC-PoA. ASC-PoA memuat langkah-langkah nyata untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan di dalam berbagai situasi dan tantangan. Dengan disepakatinya ASC-PoA pada KTT ASEAN ke-10 ini, maka ASEAN kini dapat mengembangkan kerjasama di bidang politik dan keamanan yang meliputi *political development, shaping and sharing of norms, conflict prevention, conflict resolution dan post-conflict peace building*. AScC-PoA memuat berbagai langkah untuk mewujudkan suatu masyarakat ASEAN yang “berkepedulian” (*caring society*). Masalah-masalah kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, keadilan dan pemerataan adalah sejumlah hal yang akan ditangani melalui AScC-PoA.
37. Selain kedua pilar Komunitas ASEAN tersebut, dalam kurun waktu yang bersamaan, ASEAN telah berhasil menyusun *Vientiane Action Programme (VAP)*. VAP merupakan program jangka pendek-menengah (2004-2010) yang menjabarkan rencana aksi ketiga pilar *ASEAN Community* (politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya), serta program integrasi dan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan antar negara ASEAN.
38. Dalam upaya penyelesaian secara damai konflik, sengketa, dan perbedaan di kawasan, para Pemimpin ASEAN menyepakati pentingnya mekanisme *High Council* yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam TAC. Sehubungan dengan itu, Indonesia menyambut gembira ditandatanganinya instrumen aksesori TAC dalam rangkaian KTT kali ini, yaitu oleh Republik Korea pada tanggal 27 November 2004 serta Federasi Rusia pada tanggal 29 November 2004. Aksesori kedua negara tersebut melengkapi deretan lima negara yang sudah terlebih dahulu mengaksesi TAC yaitu Papua New Guinea, China, India, Jepang dan Pakistan. Hal ini mencerminkan pengakuan dan keterikatan negara-negara luar kawasan terhadap TAC sebagai tata perilaku hubungan damai dan bersahabat antar negara di kawasan Asia Tenggara. Aksesori tersebut juga merupakan wujud keberhasilan diplomasi ASEAN dalam meningkatkan perdamaian dan keamanan, bukan saja di Asia Tenggara namun juga di wilayah sekitarnya.
39. Pada KTT ASEAN ke-10 juga telah dicapai konsensus untuk menyelenggarakan KTT Asia Timur (*East Asia Summit/EAS*) pada tahun 2005 di Kuala Lumpur. Namun demikian, sesuai pandangan Indonesia, para Kepala Negara sepakat bahwa masih diperlukan pemahaman bersama mengenai apa yang dimaksud dengan EAS tersebut, misalnya yang menyangkut negara peserta, agenda, dan masalah-masalah lainnya. Dalam kaitan ini, KTT menugaskan para Menlu ASEAN untuk mendiskusikan modalitas EAS.
40. Dalam kerangka kerjasama antara ASEAN dengan ketiga negara di Asia Timur (ASEAN+3) yaitu China, Jepang dan Republik Korea telah dibahas mengenai pelaksanaan rekomendasi laporan akhir *East Asia Study Group*. Dalam pelaksanaan rekomendasi jangka pendek,

Indonesia akan menjadi “penggerak” dari kegiatan *the Promotion of East Asian Studies* dalam bentuk program pelatihan bahasa untuk para diplomat muda. Untuk pelaksanaan rekomendasi jangka menengah-panjang, pada KTT ini Indonesia telah mengumumkan menjadi “penggerak” kegiatan “*Work closely with NGOs in policy consultation and coordination to encourage civic participation and state-civil society partnership in tackling social problems*”. Hal ini sejalan dengan pengalaman Indonesia membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat madani dalam menangani berbagai masalah sosial.

41. Dalam kerjasama ASEAN dan China, telah disepakati *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity*; yaitu program kerjasama komprehensif di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya. Pada kesempatan rangkaian KTT ASEAN juga telah ditandatangani *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China* dan *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China*. Penandatanganan kedua dokumen tersebut menegaskan tekad ASEAN dan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan ASEAN-China pada tahun 2012.
42. Sementara itu, dalam upaya memerangi terorisme internasional, ASEAN dan Jepang menyepakati *Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*. Melalui deklarasi bersama ini ASEAN dan Jepang akan mengembangkan kerjasama dalam memerangi terorisme melalui penguatan kerjasama pertukaran informasi, penegakan hukum, termasuk ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam soal-soal kriminal.
43. Kerjasama ASEAN dengan Republik Korea memiliki landasan kerjasama dengan ditandatanganinya *Joint Declaration on Comprehensive Cooperation between the ASEAN and the Republic of Korea* yang merupakan cetak biru dalam peningkatan kerjasama kedua pihak di masa depan.
44. Kerjasama ASEAN dengan India semakin diperkuat dengan telah disepakatinya *ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity* dan *Plan of Action to implement Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity*, yang merupakan dokumen dasar dan rencana aksi peningkatan kerjasama ASEAN-India di masa depan.
45. Dalam rangka memperingati tiga puluh tahun hubungan kerjasama ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru, telah diselenggarakan *Commemorative Summit* pada tanggal 30 November 2004, di Vientiane, Laos. Pada kesempatan ini, ASEAN dan kedua negara tersebut sepakat meluncurkan perundingan pembentukan kawasan perdagangan bebas *ASEAN Free Trade Area-Closer Economic Relations (AFTA-CER FTA)*. Hal ini merupakan kesepakatan penting yang tertuang dalam *Joint Declaration of the Leaders at the ASEAN – Australia and New Zealand Commemorative Summit*.
46. Di samping itu, ASEAN telah mendorong agar Australia dan Selandia Baru mengaksesi TAC. Dalam kaitan ini, Selandia Baru telah menyatakan sedang mempelajari secara positif kemungkinan melakukan akses terhadap TAC dan konsultasi yang dilakukan Pemerintah

Selandia Baru dengan pihak-pihak terkait sampai saat ini menunjukkan tanda-tanda yang baik.

47. Setahun setelah dicanangkan oleh KTT ke-9 ASEAN di Bali, implementasi rencana kegiatan di bidang ekonomi, dalam rangka perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN sebagai salah satu bagian Komunitas ASEAN, mulai diwujudkan. Raihan yang terpenting adalah penandatanganan *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors* pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane. Perjanjian dasar ini meliputi 11 protokol untuk mensahkan *roadmaps* bagi pelaksanaan integrasi semua sektor prioritas, baik sektor barang maupun sektor jasa. Para Menteri yang bertanggung jawab untuk Integrasi Ekonomi ASEAN ditugaskan melanjutkan koordinasi dan pemantauan demi keberhasilan integrasi sektor-sektor prioritas tersebut, termasuk percepatan realisasi liberalisasi perdagangan barang pada tahun 2007 dan jasa pada tahun 2010.
48. Implementasi keputusan mengenai integrasi sektor-sektor prioritas kiranya memerlukan dukungan sektor swasta yang terkait sebagai pelaku usaha. Sosialisasi oleh serta koordinasi yang erat dengan Pemerintah akan sangat menentukan keberhasilannya. Dalam kaitan ini ASEAN juga telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di bidang ekonomi yang merujuk pada mekanisme serupa di *World Trade Organization. ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* ini memungkinkan negara-negara ASEAN yang dirugikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui mekanisme tersebut yang semata-mata berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum.
49. Dalam upaya meningkatkan integrasi ekonomi dengan negara-negara mitra dagangnya, ASEAN telah menyepakati untuk meluncurkan negosiasi tentang kawasan perdagangan bebas dengan Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru mulai awal 2005. Sementara itu, dengan China telah ditandatangani Perjanjian Perdagangan Barang dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam rangka perwujudan *ASEAN-China Free Trade Area* yang akan dibentuk pada tahun 2010/2015. Dengan India ditegaskan lagi perlunya mempercepat proses negosiasi ASEAN-India FTA sehingga dapat terwujud pada tahun 2011/2016.
50. Di bidang sosial budaya, kerjasama fungsional ASEAN diarahkan bagi terbentuknya Komunitas Sosial Budaya ASEAN sebagai salah satu pilar dari Komunitas ASEAN dan diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2020. Komunitas Sosial Budaya ASEAN bertujuan untuk membentuk suatu Asia Tenggara yang terikat secara bersama dalam kemitraan sebagai suatu masyarakat yang berkepedulian. Dalam rencana Aksi Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (AScC-POA) yang disahkan pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, dijabarkan langkah-langkah strategis yang perlu dilaksanakan bagi terbentuknya Komunitas Sosial Budaya ASEAN dari saat ini hingga tahun 2020, sehingga mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam ASEAN Vision 2020.
51. Rencana Aksi Komunitas Sosial-Budaya ASEAN tersebut pada pokoknya mencakup empat unsur utama, yaitu unsur pengembangan masyarakat yang berkepedulian untuk menghadapi masalah-masalah kemiskinan, keadilan dan pembangunan; unsur pengelolaan dampak sosial dari adanya integrasi ekonomi regional dengan pembangunan landasan sumber daya manusia yang kompetitif dan sistem jaminan sosial yang memadai; unsur

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan; dan penguatan dasar-dasar identitas regional yang diarahkan pada pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020. Rencana Aksi Komunitas Sosial-Budaya ASEAN memuat berbagai langkah-langkah khusus (*specific measures*) sebagai penjabaran dari keempat unsur utama tersebut yang secara lebih rinci dituangkan dalam program-program jangka menengah hingga tahun 2010 dalam *Vientiane Action Programme*.

52. Dalam rangka pelaksanaan program-program tersebut, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat Indonesia perlu memperkuat kemitraan yang telah terjalin selama ini. Kemitraan tersebut sangat penting agar kita dapat mengambil manfaat dari perkembangan di tingkat regional ASEAN tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **B. BILATERAL**

### **Asia Pasifik**

53. Hubungan RI-Brunei Darussalam semakin terarah setelah diformalkan dengan MOU Komisi Bersama yang ditandatangani oleh Menlu Indonesia dan Menlu Brunei di New York pada tanggal 27 Nopember 1999. Sejak itu kedua negara telah mengikat diri kepada kesepakatan bahwa semua bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam baik yang sudah ada maupun yang akan datang harus bersumber kepada MOU Komisi Bersama tersebut yang pelaksanaannya dipimpin oleh Departemen Luar negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Brunei Darussalam. Sebagai salah satu upaya melindungi TKI di Brunei Darussalam, Pemerintah Indonesia mengusulkan dibentuknya MoU di bidang Ketenagakerjaan. MOU dimaksud sangat penting sebagai piranti yang dapat melindungi warga negara/pekerja Indonesia maupun menyediakan tenaga trampil sebagaimana diperlukan oleh Brunei Darussalam.
54. Hubungan bilateral Indonesia - Malaysia yang dilandasi oleh adanya semangat serumpun telah mendorong terus berkembangnya kerjasama kedua negara di berbagai sektor. Walaupun demikian keberadaan sejumlah besar TKI ilegal di Malaysia merupakan permasalahan yang senantiasa menjadi salah satu isu yang menonjol dalam hubungan bilateral RI-Malaysia. Selain masalah TKI, terdapat pula masalah illegal logging dan perdagangan kayu ilegal yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, masalah delimitasi batas laut dan *overlapping claim* terhadap 2 blok minyak di laut Sulawesi.
55. Hubungan bilateral Indonesia-Filipina mengalami peningkatan terutama setelah ditandatanganinya MOU mengenai pembentukan Komisi Bersama Indonesia-Filipina pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Fidel V. Ramos ke Jakarta tahun 1993 2002. Masalah warga asal Indonesia tanpa dokumen di Filipina Selatan merupakan masalah yang selama ini menjadi issue yang belum terselesaikan dalam hubungan RI-Filipina. Mayoritas warga Indonesia di Filipina Selatan telah berada di Filipina sejak beberapa generasi. Sidang *Working Group on Maritime and Oceans Concerns* Indonesia–Filipina telah diselenggarakan di Manila tanggal 1-5 Desember 2003, yang antara lain membicarakan delimitasi batas maritim kedua negara. Pemerintah Filipina telah menegaskan kembali pengakuan

kedaulatan Indonesia atas Pulau Miangas. Pertemuan ke-4 *Joint Commission on Bilateral Cooperation (JCBC)* telah dilakukan di Manila pada bulan Nopember 2004.

56. Sebagai tetangga yang berbatasan langsung, dengan latar belakang sejarah interaksi kedua bangsa, seharusnya hubungan Indonesia-Singapura dapat lebih saling menguntungkan. Kenyataannya, terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan itu, karena Indonesia belum memperoleh manfaat optimal yang seimbang dengan manfaat yang ditarik Singapura. Terdapat beberapa isu hubungan antara kedua negara yang perlu segera diselesaikan yaitu perjanjian ekstradisi, ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura, dan penetapan batas wilayah laut. Dengan terbentuknya pemerintahan baru di Indonesia dan Singapura, diharapkan upaya-upaya untuk melanjutkan proses penyelesaian masalah-masalah tersebut dapat terus ditingkatkan. Kehadiran PM Lee Hsien Loong pada upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2004 dan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada bulan Nopember 2004 diharapkan akan semakin membuka peluang kerjasama dan penyelesaian masalah bilateral tersebut.
57. Hubungan bilateral RI dengan Thailand selama ini telah berlangsung dengan baik berkat pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin kedua negara. Hal ini tercermin dari kesamaan pandangan dalam masalah-masalah internasional, khususnya dalam masalah-masalah seperti stabilitas dan keamanan kawasan, pembangunan negara-negara berkembang dan perdamaian. Hubungan dagang kedua negara juga mengalami kenaikan sebesar 25% yaitu US\$ 3.2 Milyar tahun 2002 menjadi US\$ 4.1 Milyar tahun 2003. Isu-isu lain yang paling menonjol adalah pembentukan *Joint Cabinet Meeting*, Delimitasi Kedua Negara dan *illegal fishing*.
58. Untuk lebih mempererat hubungan RI-Kamboja, kedua negara telah melakukan pertemuan Komisi Bersama tingkat Pejabat Tinggi yang kedua di Yogyakarta pada Agustus 2004. Melalui pertemuan tersebut, kedua pemerintah kembali menyatakan keinginan untuk mendekatkan hubungan yang telah ada. Pemerintah RI juga memberikan komitmennya untuk terus membantu pembangunan di Kamboja. Salah satu program nyata dari komitmen Pemerintah RI adalah pemberian beasiswa bagi peserta dari Kamboja untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Kedua pemerintah juga telah menyetujui untuk mencanangkan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Desember 2004.
59. Dalam upaya meningkatkan hubungan RI-Laos, Menteri Luar Negeri kedua negara telah mengadakan pertemuan Komisi Bersama I pada bulan Mei 2004 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut pemerintah Laos menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pelatihan yang diberikan bagi pejabat Laos pada KTT IX ASEAN di Bali, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan sumber daya manusia dan suksesnya penyelenggaraan KTT X ASEAN pada bulan November 2004 di Laos. Pertemuan juga membahas kerjasama di bidang pertahanan dan militer. Indonesia akan melanjutkan pemberian bantuan pelatihan di bidang pendidikan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bagi pejabat militer Laos.
60. Pemerintah RI telah berulang kali menyatakan perhatian dan dukungannya dalam menghadapi perkembangan-perkembangan yang terjadi di Myanmar dan terkait dengan program rekonsiliasi dan demokratisasi di Myanmar. Myanmar juga terus mendukung

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak pernah membiarkan wilayah Myanmar sebagai tempat kegiatan kelompok anti-NKRI. Sehubungan dengan hal tersebut, Menlu RI telah berkunjung ke Myanmar pada tanggal 11-12 Nopember 2004 dan bertemu dengan Perdana Menteri dan Menlu Myanmar yang baru.

61. Setelah menyepakati batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam di tahun 2003, Pemerintah Vietnam mengumumkan di paruh pertama 2004 bahwa pihaknya telah meratifikasi perjanjian tersebut. Di pihak Indonesia, perjanjian dimaksud kini masih dibahas oleh tim batas landas kontinen guna mempersiapkan seluruh keperluan hukum dan teknis sebelum diratifikasi. Pemerintah RI juga telah menyatakan apresiasi dan pujian atas suksesnya KTT ASEM (*Asia-Europe Meeting*) di Hanoi pada bulan Oktober 2004 yang lalu. Pemerintah RI berpandangan bahwa Pemerintah Vietnam telah berperan besar dalam mengakomodasi keinginan segala pihak, terutama yang berkaitan dengan perluasan keanggotaan ASEM.
62. Hubungan RI-RRC di berbagai bidang termasuk bidang politik semakin meningkat seperti terlihat pada tingginya frekuensi pertemuan yang dilaksanakan antara kedua kepala negara di berbagai kesempatan, seperti di KTT APEC di Santiago, Chile dan KTT ASEAN di Vientiane, Laos pada bulan Nopember 2004. Pada tingkat menteri luar negeri, hubungan yang dekat juga terlihat dari pertemuan kedua pejabat dalam Komisi Bersama Kerjasama Bilateral tingkat Menteri di Beijing pada bulan April 2004, *ASEAN Ministerial Meeting* di Jakarta bulan Juni 2004, dan pertemuan di Sidang Majelis Umum PBB ke-59 di New York bulan September 2004. Pemerintah RRC juga telah mengutus Utusan Khusus Presiden RRC untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden RI yang baru terpilih. Dalam kunjungan tersebut, kedua pemerintah sepakat untuk mencanangkan kemitraan strategis pada tahun 2005 sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperluas hubungan yang telah ada.
63. Di bidang ekonomi hubungan RI-RRC amat terpengaruh dengan kesepakatan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China yang dicapai pada akhir tahun 2004. Dengan kesepakatan tersebut, target peningkatan hubungan perdagangan kedua negara yang cukup progresif akan lebih mudah tercapai. Pemerintah RRC juga berperan penting dalam pembangunan di Indonesia dengan memberikan bantuan hibah selama beberapa tahun ini termasuk pada bulan Nopember 2004 sebesar RMB 30 juta. Pemerintah RRC juga telah menyediakan *concessional loan* bagi beberapa proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk proyek pembangunan Jembatan Suramadu, dengan jumlah total US\$ 550 juta.
64. Hubungan bilateral RI-Jepang juga semakin meningkat. Jepang masih merupakan negara donor utama bagi Indonesia, baik untuk sektor pemberian pinjaman maupun hibah. Sejak tahun 1967 hingga 2003, jumlah *pledge* (pinjaman dan hibah) yang diberikan Jepang kepada Pemerintah RI sebesar US\$ 25,6 milyar. Sepanjang tahun 2003 (data terakhir), jumlah pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah RI untuk berbagai program dan proyek kurang lebih senilai 137,952 milyar yen sedangkan hibahnya senilai 4,260 milyar yen. Pemerintah Jepang mendukung keputusan Pemerintah RI untuk keluar dari program IMF akhir tahun 2003 dan menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia dalam menjalankan ekonominya pasca kelulusan Indonesia dari program IMF.

65. Pemerintah Jepang juga telah memberikan dukungan bagi penyelenggaraan Pemilu 2004 dengan bantuan dana sebesar US\$ 11 juta yang diambil dari dana *Accumulative Counterpart Fund* NPTGA periode 1998 s/d 2000 untuk pengadaan kotak suara dan dana tambahan sebesar US\$ 11,36 juta untuk pengadaan bilik suara, yang diambilkan dari sebagian dana Non Project Type tahun 2003 sebesar US\$ 22,7 juta.
66. Mengenai masalah Semenanjung Korea, Pemerintah RI secara konsisten mendukung proses reunifikasi Korea secara damai. Sebagai bentuk dukungan tersebut, Pemerintah RI menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah dalam proses perundingan kedua negara sekiranya kedua negara tersebut menghendaki. Disamping itu, Indonesia juga mendukung dilanjutkannya proses *Six-Parties Talks*. Pihak Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) melalui kedutaan besarnya di Jakarta telah menyampaikan informasi mengenai perkembangan masalah dimaksud, termasuk pertimbangan RRDK tidak bersedia melanjutkan Pertemuan Enam Pihak (*Six-Parties Talks*) Putaran IV yang seharusnya diadakan pada bulan September 2004.
67. Hubungan bilateral RI - Republik Korea juga menunjukkan peningkatan. Dalam bidang kerjasama ekonomi, investasi Republik Korea di Indonesia menunjukkan tingkat yang cukup tinggi dengan nilai akumulatif sejak tahun 1967 - 2001 sebesar US\$ 9,8 milyar yang mencakup 1.400 proyek, dan juga konsistensi pemberian bantuan Pemerintah Republik Korea kepada Indonesia. Bantuan Republik Korea diberikan dalam bentuk hibah baik dalam bentuk pelatihan maupun bantuan untuk proyek.
68. Hubungan bilateral RI-Australia juga menunjukkan peningkatan yang menggembirakan sebagaimana terlihat dari berbagai bentuk kerjasama di bidang pemberantasan terorisme dan tindak kejahatan lintas negara. Hubungan di bidang perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, energi, pertambangan, iptek, telekomunikasi, keuangan, dan pengembangan UKM juga menunjukkan peningkatan. Total perdagangan RI-Australia periode Januari–Agustus 2004 mencapai US\$ 3,33 milyar, dengan demikian menunjukkan peningkatan sebesar US\$ 408 juta atau naik 13,95 % jika dibandingkan periode yang sama tahun 2003. Dalam periode tersebut, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Australia sebesar US\$ 199 juta. Bantuan pembangunan Australia untuk Indonesia tahun 2004-2005 mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni menjadi A\$160,8 juta dari A\$151,7 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar A\$ 125 juta merupakan program bilateral dan sisanya sebesar A\$ 35,8 juta merupakan *global funding* yaitu dana bantuan yang dipadukan dengan komitmen Australia pada organisasi internasional/regional serta NGO. Dalam empat tahun terakhir, bantuan luar negeri Australia ke Indonesia meliputi rata-rata 180-an proyek kegiatan setiap tahun.
69. Hubungan bilateral RI-Selandia Baru pada hakekatnya tetap erat. Selandia Baru menyambut positif komitmen dan upaya Presiden RI bagi terwujudnya demokratisasi, penghormatan terhadap HAM dan semangat toleransi. Dalam periode 2002-2007 bantuan Selandia Baru akan berkisar NZ\$ 40 milyar yang diprioritaskan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dalam rangka pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Selandia Baru secara aktif membantu pembangunan Indonesia terutama dalam kerangka bantuan *Official Development Assistance (ODA)*.

70. Hubungan RI dengan Timor Leste juga menunjukkan perkembangan yang baik seperti terlihat dari pertemuan pejabat tinggi kedua negara yang berlangsung secara intensif, terutama untuk membicarakan masalah-masalah residual, seperti asset WNI yang dideportasi, perbatasan laut dan sebagainya. Pengelolaan hubungan tersebut juga akan terus dilakukan melalui mekanisme konsultasi bilateral maupun konsultasi dengan negara ketiga seperti tripartit Indonesia - Timor Leste - Australia.
71. Hubungan RI dan Papua Nugini (PNG) menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditandai dengan telah dimilikinya beberapa mekanisme pertemuan bilateral guna membahas beberapa isu yang muncul menyangkut hubungan kedua negara. Di bidang politik dan keamanan, telah ada forum *Joint Border Committee* (JBC) yang hingga saat ini sudah diadakan pertemuan yang ke-23 di Jakarta tanggal 29-30 Nopember 2004. Dalam rapat tersebut, kedua negara sepakat bahwa pembukaan secara resmi jalan darat dan perbatasan (Skow-Wutung) menunggu persiapan di kedua belah pihak. Pertemuan lainnya yang ada dibawah JBC adalah *Border Liaison Meeting, Joint Sub-Committee on Security, Joint Sub Comitte on Survey, Demarcation, and Mapping*.
72. Kedua negara juga telah mengadakan Pertemuan Pertama Komisi Bersama Tingkat Menlu (*Joint Ministerial Commission-JMC*) di Port Moresby bulan Juni 2003. Seharusnya Pertemuan JMC II diadakan di Indonesia, namun karena adanya pemilu serta pergantian pemerintahan di Indonesia, Indonesia belum bisa menyelenggarakannya pada tahun 2004. Diharapkan pada tahun 2005, pertemuan dapat diadakan di Indonesia.
73. Masalah pelintas batas terus ditangani oleh pemerintah kedua negara. Pemerintah PNG dengan bantuan UNHCR telah melaksanakan pemindahan para pelintas batas ilegal asal Irian Jaya dari Warakongkong ke East Awin Camp sejak minggu terakhir bulan September 2004. Untuk mengatasi aktivitas OPM dan pendukungnya yang selama ini menggunakan PNG untuk melakukan penyerangan ke pos TNI dan Polri, atau aktivitas menentang NKRI, Pemerintah RI mengharapakan Pemerintah PNG dapat memperketat pengawasan di wilayah perbatasan.
74. Hubungan bilateral RI-Fiji semakin meningkat pesat yang ditunjukkan dengan meningkatnya volume perdagangan kedua negara yang sampai saat ini menunjukkan surplus bagi RI. Kedua negara sedang memproses pembentukan MOU bidang pariwisata yang rencananya akan ditandatangani saat kunjungan Menteri Pariwisata RI ke Fiji tahun 2005. Di bidang pertanian, Menteri Pertanian RI dalam kunjungan kerjanya ke Fiji pada 28-29 April 2004 telah memberikan bantuan berupa 10 buah traktor tangan dan pengiriman 3 penyuluh pertanian guna membantu pemerintah Fiji mengembangkan bidang pertaniannya. Kedua negara telah sepakat akan menandatangani MOU di bidang pertanian pada saat kunjungan Menteri Pertanian Fiji ke Indonesia bulan April tahun 2005.
75. Sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara, hubungan RI-Vanuatu secara umum berjalan baik walaupun terdapat beberapa tokoh yang mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) di dalam tubuh pemerintahan Vanuatu. Masalah OPM tetap berpotensi menjadi ganjalan bagi hubungan kedua negara, terutama pada saat simpatisan OPM yang bersikap mendukung atas dasar prinsip *Melanesian Brotherhood* berhasil memegang tampuk pemerintahan. Hubungan bilateral kedua negara mengalami babak baru setelah

kunjungan Menlu Vanuatu Moana Carcasses ke Indonesia pada bulan Maret 2004. Dalam kunjungan tersebut, Menlu Vanuatu dan Menlu RI menandatangani *Joint Communique*, dimana Menlu Vanuatu menyatakan dukungan atas pemberlakuan otonomi khusus untuk Papua dalam kerangka NKRI. Dari pihak Indonesia, Menteri Pertanian RI, Dr. Bungaran Saragih mengadakan kunjungan kerja ke Vanuatu bulan April 2004 sebagai tindak lanjut dari pembicaraan bilateral kedua Menteri pada saat kunjungan Menlu Vanuatu ke Indonesia bulan Maret 2004.

## **Asia Selatan dan Tengah**

76. Hal penting yang menandai hubungan bilateral RI-India dalam tahun 2004 adalah penandatanganan MoU Kerjasama Penanggulangan Terorisme RI-India oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di sela-sela Pertemuan *ASEAN Regional Forum (ARF)* tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta. Kedua negara menyadari perlunya mempererat kerjasama internasional dalam semua tingkatan untuk memberantas terorisme internasional melalui upaya yang komprehensif dengan cara meningkatkan kerjasama antara pejabat-pejabat keamanan, pertahanan, intelijen dan institusi-institusi penegakan hukum diantara kedua negara. Dengan pemberlakuan MoU tersebut, Indonesia dan India dapat bekerjasama sepenuhnya dalam memberantas tindakan-tindakan ilegal yang berkaitan dengan warga negara masing-masing. Di samping itu, pada tanggal 28 Nopember 2004 Presiden RI telah mengadakan pertemuan bilateral dengan PM India di sela-sela KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos guna membicarakan berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan kedua negara di segala bidang, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing negara antara lain di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pertahanan, pertanian, *marine sciences* dan *renewable energy*.
77. Hubungan bilateral RI-Pakistan dalam tahun 2004 berjalan baik dan terus meningkat. Selain melakukan upaya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan, Pemerintah RI dan Pakistan juga telah membentuk kerjasama dalam menangani bahaya narkoba dengan menandatangani MoU Pemberantasan Narkoba pada tanggal 8 Juli 2004, bertepatan dengan peringatan Hari Internasional Melawan Narkoba. Pemerintah kedua negara juga bertekad bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama pemberantasan terorisme sebagai tindak lanjut dari MoU Terorisme, masing-masing negara akan segera membentuk badan pelaksana teknis lapangan dalam menghadapi aksi terorisme.
78. Hubungan RI – Bangladesh semakin meningkat intensitasnya dalam tahun 2004, yang ditandai dengan terselenggaranya kunjungan PM Bangladesh Begum Khaleda Zia ke Indonesia pada tanggal 23-25 Januari 2004, sebagai balasan atas kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Dhaka pada bulan Juni 2003. Komitmen untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Bangladesh di berbagai bidang dapat terlihat dari perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2004 antara lain adalah: 1) *Mou on Establishment of Joint Commission*, 2) *Trade Agreement*, 3) *MoU on the Establishment of Comprehensive Trade and Economic Partnership* dan 4) *Arrangement Culture Exchange Programme for the year 2004-2007*.
79. Hubungan bilateral RI-Iran semakin meningkat dengan adanya kunjungan kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Iran bersamaan dengan penyelenggaraan KTT D-8

pada bulan Februari 2004 yang disusul dengan Sidang ke-8 Komisi Bersama RI-Iran tingkat Menteri yang telah diselenggarakan di Jakarta, 28 – 30 April 2004. Sementara itu, Pertemuan ke-2 Konsultasi Bilateral RI-Iran tingkat Direktur Jenderal dijadwalkan akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18-19 Januari 2005 dimana pada kesempatan itu, delegasi Iran yang dipimpin oleh Wakil Menlu juga akan menyampaikan pesan Presiden Iran Moh. Khatami kepada Presiden RI.

80. Dengan telah diaktifkannya kembali kantor KBRI Kabul sejak Januari 2004, hubungan bilateral RI-Afghanistan khususnya di bidang ekonomi dan sosial budaya dapat ditingkatkan kembali. Indonesia tetap memberikan komitmennya untuk mendukung proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Afghanistan dan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Afghanistan di bawah kepemimpinan Presiden Hamid Kharzai, terutama setelah berhasil dilaksanakannya pemilu Presiden yang didukung oleh dunia internasional. Sehubungan dengan itu, Presiden RI atas nama pemerintah dan rakyatnya menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Hamid Karzai sebagai Presiden Afghanistan hasil pemilu pada tanggal 9 Oktober 2004.
81. Secara umum hubungan bilateral RI-Uzbekistan pada tahun 2004 berjalan baik, utamanya di bidang sosial budaya ditandai dengan penyerahan uang bantuan sebesar US\$ 6.000 dari Pemerintah RI kepada salah seorang warga Uzbekistan yang menulis buku mengenai Ir. Soekarno dalam bahasa Uzbek. Dengan selesainya penulisan dan akan diterbitkannya buku mengenai presiden pertama RI tersebut, maka hal ini diharapkan akan dapat mempererat hubungan persaudaraan rakyat dan meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Nama Ir. Soekarno juga diusulkan untuk menjadi nama jalan di kota Samarkhand, Uzbekistan.
82. Hubungan bilateral RI-Azerbaijan telah terjalin baik sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara, dan terus menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal ini antara lain ditandai dengan ditandatanganinya “Nota Kesepahaman Antara Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Azerbaijan Mengenai Kerjasama dan Konsultasi” oleh Menlu RI dengan Menlu Azerbaijan di sela-sela SU PBB di New York tanggal 23 September 2004.
83. Hubungan luar negeri RI-Kazakhstan selama tahun 2004 berlangsung baik dan berjalan ke arah yang lebih positif, baik dalam kerangka hubungan bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka multilateral hal ini antara lain ditunjukkan dengan adanya saling dukung posisi kedua negara dalam pencalonan keanggotaan ECOSOC.

## **Afrika**

84. Upaya peningkatan hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Afrika ditandai dengan dilakukannya serangkaian kunjungan para pejabat tinggi dari Indonesia dan Afrika, yang menghasilkan berbagai bentuk kerjasama, antara lain :
  - a. Kunjungan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Madagaskar, Jean Jacques Rabenirina ke Jakarta tanggal 7-13 Maret 2004, yang telah menghasilkan *Joint Declaration* di bidang kebudayaan antara kedua negara.

- b. Kunjungan delegasi Menteri Luar Negeri RI ke Mozambique, Afrika Selatan, Zimbabwe dan Swaziland tanggal 18-27 Maret 2004 dalam rangka penandatanganan MoU mengenai Komisi Bersama antara RI dengan Swaziland dan Afrika Selatan dan pertemuan I Komisi Bersama antara RI-Mozambique. Dalam kunjungan tersebut, Mozambique, Swaziland dan Zimbabwe telah menyatakan dukungannya secara tertulis bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB periode tahun 2007-2008.
- c. Kunjungan Menteri Luar Negeri Tanzania, Jakaya Kikwete ke Jakarta pada tanggal 30 Maret-1 April 2004, yang sekaligus menghasilkan MoU Pembentukan Komisi Bersama RI-Tanzania.
- d. Kunjungan pribadi Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe ke Jakarta tanggal 6-8 Januari 2004 menyusul keluarnya Zimbabwe dari *Commonwealth*. Hubungan bilateral juga semakin intensif dengan dikirimnya tim advance dari Kemlu Zimbabwe untuk menjajaki kemungkinan pembukaan Kedubes Zimbabwe di Jakarta tanggal 4 Mei 2004.
- e. Kunjungan delegasi NDLEA (*Nigerian National Drug Law Enforcement Agency*) ke Indonesia pada tanggal 20-25 Juni 2004 dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang pemberantasan narkoba. Salah satu fokus kunjungan tersebut adalah pembahasan mengenai MoU antara BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan NDLEA.
- f. Kunjungan Menteri Prasarana Jalan, Perhubungan Darat dan Laut Senegal, Mamadou Seck pada tanggal 29 Nopember-3 Desember 2004 dalam rangka menyewa kapal Ferry Tipe 500, MV. Willis milik PT. PELNI, yang akan digunakan sebagai alat transportasi antar pulau di negara tersebut.

### Timur Tengah

- 85. Situasi di Irak belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan meskipun telah dicapai penyerahan kedaulatan (*transfer of sovereignty*) dari *Coalition of Provisional Authority* (CPA) bentukan Amerika Serikat kepada Pemerintah Sementara Irak pada tanggal 28 Juni 2004. Ketegangan terus meningkat sebagai akibat terjadinya kontak senjata antara Pemerintah Irak dengan kelompok pemberontak, yang bukan saja menyebabkan terus jatuhnya korban sipil dan memburuknya situasi keamanan di Irak, namun juga terhadap negara-negara di sekitar Irak. Terjadinya serangan besar-besaran pasukan gabungan AS dan Pemerintah Irak pada bulan Nopember 2004 terhadap kota Fallujah yang dipandang sebagai basis pasukan pemberontak menambah jatuhnya korban jiwa di kalangan rakyat sipil Irak. Pemerintah RI telah menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap peristiwa tersebut dan meminta pihak Amerika Serikat untuk menahan diri agar tidak mempergunakan kekerasan dan lebih mengutamakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan masalah itu.
- 86. Pemerintah RI menyambut baik penyerahan kedaulatan (*transfer of sovereignty*) dari *Coalition of Provisional Authority* (CPA) kepada Pemerintah Sementara Irak pada bulan Juni 2004 dan Resolusi DK PBB No.1546 (2004) berkaitan dengan penyerahan kedaulatan tersebut. Indonesia berharap agar hal tersebut merupakan langkah awal yang penting kearah pemulihan sepenuhnya kedaulatan Irak dan karenanya secara formal akan mengakhiri pendudukan asing atas Irak. Indonesia dan masyarakat internasional juga mengharapkan hal itu dapat menjadi suatu tahapan ke arah terselenggaranya pemilu Irak yang demokratis yang dapat membentuk suatu pemerintah Irak yang *representative* dan

*legitimate*. Dalam kaitan itu, Indonesia juga terus mencermati dari dekat implementasi Resolusi tersebut khususnya yang menyangkut otoritas berdaulat Irak atas kehadiran pasukan multi-nasional, pentahapan waktu yang direncanakan untuk transisi politik di Irak dan wujud efektif peranan inti PBB dalam membantu rakyat dan pemerintah Irak.

87. Konflik Palestina-Israel telah mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan dengan terjadinya peningkatan ketegangan dan kontak bersenjata antara kedua belah pihak. Peristiwa pembunuhan terhadap tokoh pimpinan Hamas oleh Israel bulan Maret dan April 2004 telah menimbulkan kekhawatiran akan semakin meningkatnya aksi kekerasan di wilayah tersebut. Di lain pihak, kebijakan Pemerintah Israel membangun tembok pemisah juga telah menyebabkan semakin tidak menentunya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Walaupun Mahkamah Internasional dengan ketetapanannya telah menyatakan bahwa tembok pemisah tersebut adalah ilegal dan harus dibongkar, yang diperkuat dengan Resolusi Majelis Umum PBB, namun tekanan internasional tersebut tidak dipedulikan Israel.
88. Wafatnya Presiden Palestina Yasser Arafat pada tanggal 11 Nopember 2004 telah menimbulkan harapan namun juga kekhawatiran akan nasib perjuangan bangsa Palestina selanjutnya. Pemerintah dan rakyat Indonesia menyatakan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya terhadap bangsa Palestina serta menegaskan untuk tetap mendukung perjuangan Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Sebagai tanda dukungan bangsa Indonesia yang tinggi terhadap perjuangan bangsa Palestina, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi oleh Ketua MPR, Ketua DPR dan tokoh-tokoh Islam telah ikut menghadiri upacara penghormatan terakhir Yasser Arafat di Kairo, Mesir. Pemerintah RI mengharapkan proses perdamaian Palestina-Israel di dalam kerangka Peta Jalan Perdamaian (PJP/*Road Map*) dapat dilanjutkan dengan hasil akhir berdirinya Negara Palestina.
89. Sementara itu mengenai masalah Sahara Barat, Indonesia pada Sidang Komite IV SMU PBB ke-59 tanggal 18 Oktober 2004 di New York bersikap "*abstain*" dalam voting rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair. Sikap abstain Indonesia untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Maroko serta Aljazair. Pada tanggal 28 Oktober 2004 DK PBB secara konsensus mengesahkan Resolusi No. 1570 untuk memperpanjang kehadiran MINURSO (Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat) selama 6 bulan hingga 30 April 2005. Pada tanggal 10 Desember 2004, Sidang Majelis Umum PBB ke-59 telah menyelesaikan pembahasan Resolusi mengenai Sahara Barat dengan "*voting*" 50 suara menyetujui, tidak ada suara menolak dan 100 suara "*abstain*", termasuk Indonesia. Sikap Indonesia tetap pada posisi mendukung usaha-usaha PBB dengan peran serta dari seluruh pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah Sahara Barat secara adil dan diterima oleh semua pihak.
90. Dalam masalah Darfur di Sudan, Pemerintah RI telah memberikan bantuan kemanusiaan sebagai tanda simpati dan solidaritas atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Sudan berupa obat-obatan sebanyak 5 ton dan akan diberikan tambahan lagi sebanyak 5 ton untuk meringankan penderitaan pengungsi akibat konflik di Darfur. Bantuan Pemerintah Indonesia telah disampaikan pada waktu Delegasi DPR RI berkunjung ke Sudan pada bulan Agustus 2004.

91. Hubungan bilateral RI-Libya terus berkembang terutama dengan kunjungan Presiden RI pada tanggal 27-28 September 2003. Sementara itu, putra pemimpin Libya Mr. Eng Syaiful Islam Moammar Qaddafi, Presiden "*of Qaddafi International Foundation for Charitable Organisations*" mengadakan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 9-11 Nopember 2004 untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada berbagai organisasi sosial. Pada saat kunjungannya, Saeful Islam juga menyatakan dukungan Lybia sepenuhnya atas NKRI, menolak segala bentuk gerakan separatisme termasuk di Aceh, Maluku dan Papua; dan siap membantu Indonesia dalam rekonstruksi daerah-daerah konflik terutama Aceh.
92. Upaya penetrasi pasar ke kawasan Timur Tengah terus dilakukan oleh pemerintah dan para pengusaha Indonesia. Guna meningkatkan hubungan bilateral, khususnya di bidang ekonomi, Indonesia dan Mesir telah melakukan Konsultasi Bilateral di Bali tanggal 19-20 Juni 2004. Sementara itu, Menperindag RI telah mengunjungi Persatuan Emirat Arab dalam rangka Pameran Tunggal Indonesia ke-2 (Indonesia Solo Exhibition/ISE) tanggal 13-17 September 2004 di Sharjah yang diikuti oleh 350 pengusaha Indonesia. Terjadi peningkatan volume transaksi sebesar 53,63% pada ISE tersebut yang mencapai US\$ 14.134.290 dibanding volume transaksi yang dicapai ISE Pertama tahun 2003 yang berjumlah US\$ 9.199.906. Menperindag RI juga melakukan kunjungan ke Arab Saudi tanggal 26-28 September 2004 untuk Seminar Perdagangan dan Investasi Indonesia-Arab Saudi serta melakukan pertemuan bisnis dengan pengusaha Arab Saudi yang melibatkan 64 perusahaan Indonesia. Sementara itu pengusaha Tunisia melakukan kunjungan ke Indonesia tanggal 17-19 Mei 2004.

## Amerika

93. Selama tahun 2004, kawasan Amerika Utara merupakan mitra penting bagi Indonesia dari sudut politik, keamanan internasional dan ekonomi, mengingat negara-negara di kawasan tersebut, khususnya Amerika Serikat (AS) merupakan kekuatan utama dunia. Di bidang kerjasama keamanan, kedua negara memanfaatkan dua forum untuk membicarakan masalah keamanan, yaitu melalui *Indonesia-US Security Dialog* (IUSSD) dan *Bilateral Defense Dialog* (BDD). Forum IUSSD kedua telah dilaksanakan di Washington, D.C. tanggal 22-23 April 2004, sementara Forum BDD yang keempat telah dilaksanakan di Jakarta tanggal 3-4 Agustus 2004. Dengan terlaksananya pertemuan IUSSD kedua dan kesepakatan untuk melaksanakan pertemuan IUSSD ketiga di Indonesia tahun 2005, serta pertemuan interim *Bilateral Defense Dialogue* pada bulan Agustus tahun 2004, menunjukkan telah terlembaganya proses Security Dialogue sebagai salah satu komponen permanen dalam hubungan bilateral RI-AS.
94. Kerjasama *counter-terrorism* RI-AS berjalan dengan baik. Pemerintah AS terus menaruh perhatian terhadap peran Indonesia di kawasan dalam memerangi terorisme, oleh karena itu AS meningkatkan bantuan, khususnya dalam *capacity building* Kepolisian RI sehingga upaya membongkar jaringan teroris di Indonesia, menghukum para pelaku, dan mencegah terjadinya aksi terorisme di kemudian hari terus menunjukkan hasil. Indonesia hingga kini masih terus berupaya mendapatkan akses langsung terhadap Hambali yang saat ini berada dalam tahanan AS.

95. Di bidang hubungan ekonomi, AS merupakan salah satu pasar utama bagi ekspor Indonesia. Total nilai ekspor Indonesia ke AS pada bulan Januari–Agustus 2004 meningkat 13,92 % dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
96. Selama tahun 2004 beberapa Perjanjian Bilateral RI-AS telah diperbaharui. Perjanjian-perjanjian tersebut meliputi, antara lain, perjanjian di bidang pendidikan, kerjasama di bidang nuklir untuk maksud damai, serta pembaharuan perjanjian di bidang hubungan udara. Di bidang pendidikan, kedua negara telah menandatangani MoU kerjasama pendidikan dan komitmen pemerintah AS untuk memberikan bantuan untuk pendidikan di Indonesia.
97. Hubungan bilateral Indonesia-Kanada terus berjalan baik. Pada Juli 2004, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Kanada Bill Graham telah menandatangani *Joint Statement* disela-sela pertemuan *ASEAN-Post Ministerial Conference* di Jakarta. Dalam *Joint Statement* tersebut kedua Menteri sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di bidang politik, ekonomi dan perubahan-perubahan sosial yang sedang terjadi, baik di kedua negara maupun di dunia internasional.
98. Dalam kerjasama di bidang keamanan, Kanada memberikan komitmen untuk memberikan pelatihan kepada aparat keamanan Indonesia untuk ancaman *bio-chemical terrorism*, komitmen untuk memberikan pelatihan serta peralatan keamanan sebagaimana disampaikan oleh Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Randolph Mank, dalam sambutannya pada Seminar *Indonesian Outlook* di Vancouver, 12 Oktober 2004.
99. Disamping itu, untuk merealisasikan pelatihan anti teroris di bidang *bio-chemical terrorism* tersebut, Pemerintah Kanada telah mengundang 4 pejabat keamanan dari Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Departemen Pertahanan untuk melakukan peninjauan ke Pusat CBRN (*Chemical, Biological, Radiological and Nuclear*) Incident Response di Kanada pada awal Oktober 2004.
100. Dalam hubungan ekonomi-perdagangan, ekspansi Kanada pada perusahaan asuransi *Manulife* dan perusahaan pertambangan *INCO* di Sulawesi bernilai C\$ 5,5 milyar. Saat ini, Indonesia merupakan negara terbesar ke-2 di Asia yang menerima investasi dari Kanada. Selain itu, melalui program *CIDA*, Pemerintah Kanada yang diwakili oleh Dubes Kanada untuk Indonesia telah menanda tangani pemberian bantuan sebesar C\$ 6,4 juta dalam kerangka kerjasama *CIDA – APEC Economic Integration Program*.
101. Berkaitan dengan hubungan Indonesia-Meksiko, pada tanggal 11 Oktober 2004 Indonesia dan Cemex telah menandatangani perjanjian jual-beli LNG melalui BP-Tanggung dan perusahaan gas AS, *Sempre Energy*. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa BP-Tanggung Indonesia akan mengirim sebanyak 3,7 juta ton LNG per tahun ke terminal penerimaan *Sempre Energy* di dekat kota Ensenada Baja California, Meksiko, untuk jangka waktu 20 tahun dan akan dimulai pada tahun 2008 dengan nilai sebesar US\$ 23 milyar.
102. Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Amerika Tengah diupayakan untuk ditingkatkan melalui kehadiran perwakilan RI di kawasan tersebut yang bertujuan untuk mengurangi hambatan bagi Indonesia dalam mengenal potensi masing-masing negara di wilayah tersebut. Guna membantu proses peningkatan hubungan tersebut, Pemerintah RI

berencana untuk membuka perwakilan di Panama pada bulan November 2005, dan sedang menjajaki pembukaan hubungan diplomatik dengan Belize dan El Salvador.

103. Perkembangan hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia telah menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat antara lain pada kunjungan Kepala Negara dan Pemerintahan serta pejabat-pejabat tinggi dari negara-negara di kawasan tersebut ke Indonesia. Wakil Menlu Kuba berkunjung ke Indonesia pada tanggal 28 Februari-2 Maret 2004, Wakil Menlu Ekuador mengunjungi Indonesia tanggal 1-4 Februari 2004, dan Presiden Chile berkunjung ke Indonesia tanggal 27-28 April 2004. Sementara itu, Sidang III Komisi Bersama RI – Argentina diselenggarakan di Buenos Aires tanggal 10-12 Mei 2004, dan Sidang II Komisi Bersama RI –Suriname dilangsungkan di Yogyakarta tanggal 22 November 2004.
104. Dalam kunjungannya ke Indonesia Presiden Chile telah melakukan pembicaraan dengan Presiden RI untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara di berbagai bidang, antara lain, perdagangan, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan perhubungan udara antara perusahaan penerbangan kedua negara, pendidikan, serta kerjasama teknik. Selain itu, di sela-sela pertemuan APEC telah ditandatangani *Agreed Minutes between the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economy and Energy of the Republic of Chile on the Energy Cooperation* oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia dan Menteri Ekonomi dan Energi Chile pada tanggal 21 November 2004. Dengan ditandatanganinya *Agreed Minutes* tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang energi khususnya mengenai kemungkinan Indonesia untuk mensuplai gas ke Chile.
105. Sementara itu, pemerintah Ekuador yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Ekuador menyatakan keinginan untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia seperti terlihat dari realisasi pembukaan kantor Kedutaan Besar Ekuador di Jakarta bulan Oktober 2004 yang diikuti dengan penyerahan Surat-Surat Kepercayaan Dubes LBBP Ekuador untuk Indonesia, H.E. Alfonso Lopez Araujo pada tanggal 26 November 2004.
106. Sementara itu, dalam kesempatan kunjungan Wakil Menlu Kuba ke Indonesia telah dilakukan pembicaraan mengenai kerjasama Indonesia dan Kuba, terutama dalam bidang pertanian dan bio-farmasi.
107. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat serta kalangan dunia usaha di kawasan Amerika Selatan dan Karibia terhadap potensi perekonomian Indonesia serta potensi kerjasama ekonomi yang dapat dikembangkan dengan negara-negara kawasan, Pekan Promosi Terpadu Indonesia telah diselenggarakan di Buenos Aires dan Rio de Janeiro pada bulan Mei 2004, serta di Lima dan Guayaquil pada bulan September 2004. Disamping itu, temu usaha antara Indonesia dan kawasan Amerika Selatan dan Karibia telah dilangsungkan di Yogyakarta dan Jakarta bulan Oktober 2004. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi para pelaku bisnis khususnya Usaha Kecil dan Menengah Indonesia untuk mencari peluang dan menjalin kegiatan usaha dengan mitranya dari kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Promosi Terpadu tersebut juga telah memberikan hasil konkrit berupa transaksi pembelian atas produk-produk ekspor Indonesia dalam jumlah yang cukup besar.

## Eropa

108. Selama tahun 2004 hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat memperlihatkan kemajuan yang berarti. Hal ini tercermin antara lain dari semakin positifnya sikap dan pandangan mereka dalam melihat perkembangan demokratisasi politik, terutama atas keberhasilan pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Di bidang ekonomi, juga terjadi peningkatan hubungan yang signifikan seperti mulai pulihnya kembali kepercayaan investor di kawasan Eropa Barat terutama di bidang migas, transportasi dan komunikasi, serta sektor keuangan.
109. Peningkatan minat negara-negara Eropa Barat pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk menggalang kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme global. Meskipun demikian, upaya Uni Eropa (EU) menjadi salah satu aktor utama dalam politik global dan sebagai alternatif serta penyeimbang dari dominasi Amerika Serikat sebagai kekuatan unilateral, merupakan faktor penyebab peningkatan hubungan dan kerjasama RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat.
110. Perubahan sikap dan pandangan ini membuka peluang dalam peningkatan dan perbaikan hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat. Hal ini tercermin terutamanya dari perubahan sikap Pemerintah Swedia yang telah memulai proses tuntutan hukum Pemerintah RI terhadap pemimpin GAM Hasan Tiro dkk.
111. Masuknya sejumlah negara kawasan Eropa Tengah dan Timur menjadi anggota UE dan NATO dan perluasan keanggotaan ASEM menimbulkan tantangan dan sekaligus peluang untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Dalam tahun 2004 kemajuan yang dicapai ialah kunjungan kenegaraan Presiden Romania dan Polandia ke Indonesia dan pelaksanaan Komisi Bersama serta Konsultasi Bilateral. Peningkatan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur ini telah memantapkan arti strategis pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia yang bebas-aktif.
112. Perkembangan hubungan bilateral RI-Uni Eropa (UE) tidak terlepas dari dinamika domestik dan regional yang berkembang di UE dan di Indonesia. Di sisi UE, perluasan UE 15 menjadi 25 negara pada tanggal 1 Mei 2004 merupakan suatu keberhasilan yang signifikan bagi peranannya untuk turut menentukan peta tatanan global. Di lain pihak, situasi dalam negeri Indonesia yang diwarnai oleh kegiatan pemulihan ekonomi, perkembangan proses demokrasi dan munculnya gangguan keamanan separatisme serta ancaman terorisme, berdampak terhadap kebijakan strategis politik luar negeri masing-masing.
113. Berkaitan dengan perluasan anggota UE, Indonesia berharap bahwa perluasan anggota tersebut tidak akan mendorong orientasi UE menjadi *inward-looking*, sebaliknya Indonesia berharap perluasan keanggotaan UE tersebut justru dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perkembangan kerjasama dengan negara-negara berkembang, terutama dengan ASEAN dan khususnya Indonesia. Secara regional mantapnya Uni Eropa juga

merupakan faktor konstruktif dalam kerjasama regional, baik dalam konteks hubungan ASEAN–UE maupun antara Asia dan Eropa dalam format ASEM.

114. Dalam hal hubungan eksternal dengan Asia, pada beberapa tahun terakhir UE menunjukkan ambisi untuk meningkatkan peran politisnya di kawasan Asia Tenggara melalui upaya peningkatan kerjasama dengan ASEAN guna menciptakan *an international order based on effective multilateralism*. Indonesia dipandang sebagai negara yang mempunyai peranan strategis bagi upaya memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan. Pergantian kepemimpinan yang reformis dan lebih demokratis di Indonesia disambut baik oleh UE karena lebih membuka kesempatan bagi UE untuk mengadakan dialog politik dengan Indonesia.
115. Hubungan bilateral Indonesia-Inggris selama tahun 2004 ditandai dengan dimulainya kembali kerjasama militer Pemerintah Inggris dengan Indonesia setelah adanya embargo suku cadang peralatan militer buatan Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pertemuan bilateral RI–Inggris pada bulan Juni 2004, Inggris menerima usulan Indonesia untuk melakukan amandemen terhadap Persetujuan RI-Inggris di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (2002). Di samping itu, Pemerintah Inggris juga telah memberikan bantuan kepada Pemerintah RI melalui kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.
116. Keputusan Kementerian Luar Negeri Inggris untuk me-review *travel warning* pada bulan Juni 2004 yang membatasi kunjungan warganya ke daerah konflik di Indonesia seperti di Aceh, Papua, Maluku dan Poso, secara tidak langsung telah meningkatkan kepercayaan para wisatawan asing terhadap tingkat keamanan di Indonesia yang pada akhirnya juga berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Eropa Barat ke Indonesia.
117. Hubungan bilateral Indonesia-Jerman berlangsung dengan baik pada tahun 2004. Sebagai negara pertama yang memberikan fasilitas *debt swap* kepada Indonesia, hingga Nopember 2004 Pemerintah Jerman telah memberikan dua kali *debt swap* tersebut untuk bidang pendidikan masing-masing senilai 25,6 juta Euro dan 23 juta Euro. Di samping itu, Pemerintah Jerman juga secara prinsip sudah menyetujui pemberian *debt swap* ketiga senilai 25 juta Euro untuk bidang lingkungan hidup.
118. Dalam hubungan bilateral RI-Belanda, Menlu RI dan Menlu Belanda telah mengadakan pertemuan bilateral di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2004 dan membicarakan berbagai upaya dalam meningkatkan hubungan bilateral RI-Belanda antara lain di di bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, kerjasama *counter terrorism*, dan pemberdayaan Islam moderat di Indonesia. Di samping itu, kedua Menlu juga telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* baru sebagai pengganti *MoU on Agenda for Renewed and Intensified Bilateral Cooperation* tahun 2000 yang di dalamnya terdapat kesepakatan mengenai diadakannya pertemuan reguler dan bergiliran antara Menlu kedua negara yang didahului oleh pertemuan tingkat pejabat tinggi.
119. Untuk memenuhi permintaan Pemerintah RI dalam penanganan terhadap para pemimpin organisasi separatis bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bermukim di negaranya, Swedia telah bersedia melakukan proses hukum terhadap Hasan Tiro dkk yang

diduga terlibat dalam berbagai aksi terorisme dan gerakan separatisme di Indonesia. Tim Kejaksaan Stockholm telah melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan Februari 2004 dan tahapan hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Stockholm adalah mempelajari bukti-bukti yang diperoleh pada saat penggeledahan dan bukti tambahan yang telah disampaikan oleh Pemerintah RI pada bulan Mei 2004.

120. RI-Norwegia mengadakan pertemuan bilateralnya pada tanggal 22 Pebruari 2004 di Jakarta dan Menlu kedua negara dalam pertemuan tersebut telah menyepakati upaya peningkatan dan memperluas kerjasama bilateral dengan melembagakan Forum Konsultasi Bilateral. Kerjasama sektoral yang sedang digarap saat ini adalah kerjasama di bidang perikanan.
121. Dalam hubungan bilateral RI–Yunani, kedua negara telah menandatangani Persetujuan Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Juni 2004 sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan.
122. Hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur, pada tahun 2004 ditandai dengan terciptanya dialog dan saling kunjung pejabat serta perluasan kerjasama di bidang penanggulangan kejahatan transnasional dan terorisme. Kunjungan balasan Presiden Rmania dan Presiden Polandia ke Indonesia pada Pebruari 2004 meneguhkan pentingnya Indonesia sebagai mitra bagi negara kawasan. Pada tahun 2005, Indonesia akan merayakan 50 tahun terbentuknya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur.
123. Dalam kurun waktu 2002-2004, Indonesia telah membentuk kurang lebih 100 persetujuan bilateral dalam berbagai bidang dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Sejumlah dokumen bilateral direncanakan dapat ditandatangani pada tahun 2005, antara lain di bidang kerjasama ekonomi, pertahanan dan teknik-militer, nuklir, kedirgantaraan, UKM, investasi, pariwisata, pertanian, iptek, pendidikan, penanggulangan kejahatan transnasional dan terorisme, dan transportasi. Sebagai konsekuensi logis aksesi beberapa negara kawasan Eropa Tengah dan Timur ke dalam Uni Eropa, telah disepakati pula pembentukan Persetujuan Kerjasama Ekonomi guna menggantikan Persetujuan Perdagangan, antara lain dengan Ceko, Slovakia, Hongaria dan Polandia.
124. Kerjasama bilateral antara Pemerintah RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur yang paling menonjol ialah di bidang ekonomi dan pertahanan. Peningkatan volume perdagangan sebesar  $\pm$  36% dari US\$ 1,167 juta menjadi US\$ 1,597 juta pada tahun 2003 diperkirakan akan meningkat setidaknya pada laju yang sama pada tahun 2004. Sektor investasi selama tahun 2004 juga mencatat rencana investasi yang mencapai US\$ 1,5 juta di bidang energi, transportasi, agribisnis dan pariwisata, termasuk di bidang produksi bersama alat-alat pertahanan. Hal ini mengukuhkan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur sebagai pasar non-tradisional yang paling menjanjikan serta strategis sebagai kawasan alternatif bagi pengadaan peralatan militer Indonesia.
125. Di bidang ekonomi perdagangan, selama tahun 2004 Indonesia telah mengundang para pelaku dagang dan investasi dari beberapa negara kawasan, yaitu Polandia, Rusia, Rmania, dan Ukraina untuk hadir dalam *Trade and Investment Initiative* (TII 2004) yang diadakan pada Januari 2004. Departemen Luar Negeri RI juga telah bekerjasama dengan

Otorita Batam, Pemda Sumatra Utara, Pemda DKI, dan Pemda Bali untuk menarik kembali minat para pengusaha negara-negara tersebut di atas untuk meninjau secara langsung ke daerah-daerah tujuan.

126. Dalam hubungan bilateral RI-Rusia, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di sela-sela Pertemuan APEC di Santiago, Chile pada bulan Nopember 2004. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk mengintensifkan kerjasama bilateral RI-Rusia sesuai dengan visi pembentukan hubungan dan kerjasama pada tingkat kemitraan strategis sesuai dengan Deklarasi yang ditandatangani oleh presiden kedua negara di Moskow pada bulan April 2003. Kedua pemimpin juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama politik keamanan, pertahanan termasuk industri militer, dan investasi.
127. Hubungan kerjasama RI-UE selama tahun 2004 juga mengalami peningkatan dimana UE mengikuti dengan seksama perkembangan demokrasi di Indonesia melalui pengiriman Misi Pemantau Pemilu UE (*EU Election Observation Mission/EU-EOM*) berjumlah 236 orang pemantau. Dalam Laporan Akhir tanggal 1 November 2004, EU-EOM menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia selama tahun 2004 tersebut merupakan pemilu yang paling besar dan kompleks di dunia yang pernah diselenggarakan dan telah berhasil dilaksanakan secara demokratis, terbuka dan jujur. Isi laporan tersebut antara lain juga menyatakan bahwa pilpres putaran ke-2 merupakan peristiwa puncak dari suatu tahun pemilihan umum bersejarah yang mengkokohkan konsolidasi proses reformasi demokratis di Indonesia.
128. Upaya bersama RI-UE untuk meningkatkan kerjasama bilateral dibidang perdagangan, investasi dan kerjasama pembangunan dilakukan melalui Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Indonesia-Komisi Eropa. Indonesia memandang penting FKB sebagai sarana untuk membahas secara lebih fokus upaya untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama Indonesia-UE. Pada Pertemuan ke-4 FKB di Yogyakarta tanggal 12-13 Mei 2004 telah dibahas perkembangan situasi di masing-masing kawasan, isu-isu perdagangan, ekonomi dan investasi, perikanan serta kerjasama pembangunan RI-UE.
129. Untuk pertemuan tingkat menteri luar negeri, Menlu RI dan Menlu Troika UE telah mengadakan dua kali pertemuan selama tahun 2004. Pertemuan pertama berlangsung di Kildare, Irlandia tanggal 16 April 2004 di bawah Presidensi Irlandia dan pertemuan kedua berlangsung di Jakarta tanggal 28 Oktober 2004 di bawah Presidensi Belanda. Menjelang berlangsungnya pertemuan di Jakarta, *European Council* pada tanggal 11 Oktober 2004 mengeluarkan pernyataan mengenai pentingnya meningkatkan hubungan bilateral RI-UE dengan melembagakan pertemuan rutin pada tingkat Menlu.
130. Dalam pertemuan Menlu RI-Menlu Belanda selaku Presidensi UE, pihak UE telah menyampaikan usulan Dewan Eropa mengenai perlunya melembagakan Pertemuan Tingkat Menlu RI-Troika UE dan membentuk *Partnership and Cooperation Agreement*. Menlu RI dan UE dalam kesempatan tersebut juga menyatakan bahwa agenda Pemerintah yang ditekankan pada bidang demokrasi, perlindungan HAM dan penegakan hukum, pengentasan kemiskinan, lingkungan dan *good governance* adalah sejalan dengan

kebijakan Uni Eropa. Indonesia dan Uni Eropa sependapat bahwa *common menu* tersebut merupakan alasan yang kuat untuk mengintensifkan dialog kedua pihak.

131. Indonesia menyambut baik dukungan negara-negara anggota UE, seperti Inggris, Belanda, Denmark dan Spanyol serta Komisi Eropa terhadap pembentukan dan operasional JCLEC (*Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation*) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman terorisme di kawasan. Indonesia berpandangan bahwa kata kunci untuk memerangi terorisme adalah *empowering the moderates*. Dalam kaitan ini, Indonesia menghargai kerjasama dengan UE dalam memperkuat perekonomian masyarakat Indonesia agar mereka dapat menjadi benteng dalam menghadapi ancaman terorisme.
132. Salah satu realisasi kerjasama bilateral Indonesia dengan UE tertuang dalam Pelaksanaan *National Indicative Programme* (NIP) 2002-2004 dengan hibah sebesar 150 juta Euro. Dalam tahun 2004, terdapat dua *Financing Agreement* (FA) yang telah ditandatangani, yaitu untuk proyek *Good Governance in the Indonesian Judiciary* sebagai tambahan dari berbagai proyek yang sedang berjalan semenjak tahun 2002. Pada tanggal 20 Juli 2004, Deplu RI dan Delegasi Komisi Eropa di Jakarta telah menandatangani *Memorandum of Understanding on National Indicative Program for Indonesia for 2005-2006* dengan jumlah hibah sebesar 72 juta Euro.
133. Hubungan dengan negara-negara Eropa Barat, baik secara individu maupun Uni Eropa akan tetap menjadi salah satu prioritas hubungan luar negeri Indonesia, mengingat sebagian besar negara-negara Eropa Barat merupakan mitra utama Indonesia di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Keberhasilan pelaksanaan pemilu tahun 2004 yang damai dan demokratis menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, dan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia akan tetap mendapat prioritas dalam hubungan bilateral dari negara-negara mitra di Eropa Barat.
134. Keanggotaan beberapa negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur ke dalam UE serta reformasi yang dilakukan negara kawasan non UE dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama di bidang-bidang lainnya seperti IPTEK dan sosial budaya. Negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur yang semakin maju dan terbuka dapat dijadikan peluang bagi Indonesia untuk mengaktifkan hubungan persahabatan di bidang-bidang ini.

### **C. KERJASAMA INTRA KAWASAN**

#### **APEC**

135. Indonesia kembali memegang peranan penting dalam kerangka APEC dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan ke-4 Menteri-Menteri Transportasi APEC di Bali pada tanggal 27-29 Juli 2004. Pertemuan Tingkat Menteri tersebut antara lain menekankan kembali komitmen dari para anggota untuk menjamin keselamatan serta keamanan transportasi dan penolakan terhadap aksi-aksi terorisme dalam segala bentuk manifestasinya.

136. Dalam upaya memerangi terorisme, Indonesia selalu berperan aktif dalam berbagai kerjasama APEC yang terkait dengan masalah tersebut. Selama 2 tahun berturut-turut (2003 dan 2004), Indonesia menjadi Ketua APEC *Counter Terrorism Task Force* (CTTF) dan melalui kepemimpinannya tersebut, Indonesia selalu berupaya agar pembahasan isu *Counter Terrorism* dalam APEC tetap difokuskan pada kerjasama *Counter Terrorism* yang terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan hubungan perdagangan di kawasan Asia Pasifik.
137. Pada Pertemuan Para Menteri UKM APEC ke-11 yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Oktober 2004, telah disepakati untuk memajukan kerjasama dalam pengembangan *Micro Enterprises* (MEs). Pertemuan tersebut menghasilkan *Santiago Agenda on Entrepreneurship* yang ditujukan untuk pengembangan kewirausahaan dan peningkatan daya saing ekonomi di kawasan APEC. Indonesia mendapat pujian dari anggota Ekonomi APEC atas pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengenai *micro-finance (International Visitors Program)* yang telah diadakan pada tanggal 24-25 Mei 2004.
138. Pertemuan ke-12 Para Pemimpin Ekonomi APEC telah dilaksanakan pada tanggal 20–21 Nopember 2004 di Santiago, Chile, dengan hasil utama antara lain kesepakatan mengenai isu anti-korupsi dan pembentukan suatu mekanisme pengembalian hasil-hasil korupsi (*return of proceed from corruption*) serta *asset tracing* di antara anggota-anggota APEC. Kesepakatan yang telah dicapai tersebut merupakan suatu langkah maju bagi upaya kerjasama pemberantasan korupsi di kawasan Asia Pasifik.

#### **Asia – Europe Meeting (ASEM)**

139. Indonesia memandang penting kerjasama Asia-Eropa (ASEM) sebagai wahana dialog antara bangsa-bangsa di Asia dan Eropa. Namun Indonesia kurang puas terhadap perkembangan proses ASEM yang dewasa ini terlihat semakin mengarah kepada *block-to-block dialogue* karena para mitra UE selalu terikat pada posisi bersama UE. Hal ini juga terlihat pada sikap UE yang cenderung memaksakan kehendaknya sehingga meninggalkan prinsip-prinsip kerjasama ASEM, yaitu mengedepankan dialog berdasarkan semangat kerjasama, saling menghormati dan kemitraan yang sejajar.
140. Dalam Pertemuan Tingkat Menlu Asia-Eropa (ASEM) ke-6 (FMM 6) di Dublin, Irlandia pada tanggal 17–18 April 2004 Menlu RI telah hadir dan menjelaskan upaya yang ditempuh Pemerintah RI dalam menghadapi terorisme, antara lain penyelenggaraan *Bali Regional Minister Meeting on Counter Terrorism* pada Maret 2004 yang menyepakati pembentukan *The Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC). Demikian pula dalam hal peningkatan saling pemahaman antar umat beragama, Menlu RI menyampaikan hasil penyelenggaraan *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) di Jakarta pada bulan Februari 2004. Dalam kaitan ini, Menlu RI menekankan arti penting dialog antar agama guna meningkatkan saling pengertian dan toleransi dan menekankan bahwa sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia aktif mempromosikan *moderation in Islamic world*.

141. Indonesia telah ikut berperan aktif dalam mensukseskan terselenggaranya pertemuan KTT ASEM 5 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8–9 Oktober 2004. Adanya perbedaan pandangan antara mitra Asia dan Eropa mengenai masalah keanggotaan dan partisipasi Myanmar dalam KTT ASEM mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam mendekatkan posisi kedua pihak. Peran Indonesia tersebut diakui oleh kedua pihak dengan mengirimkan Utusan Khusus Irlandia dan Utusan Khusus Vietnam. KTT tersebut berlangsung dengan sukses dan mengandung nilai sejarah bagi proses kerjasama ASEM karena diterimanya 13 mitra baru ASEM, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Ceko, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovakia, Slovenia, Hungaria, Polandia, dan Malta.
142. Indonesia dalam KTT ASEM 5 tersebut telah menyampaikan inisiatif baru yaitu *ASEM Inter-Faith Dialogue* yang mendapat sambutan dan dukungan dari negara-negara ASEM lainnya. Dialog ini merupakan salah satu aktualisasi dari *ASEM Declaration on Dialogue Among Culture and Civilizations* yang bertujuan meningkatkan saling pemahaman dan toleransi antar agama serta menghindari munculnya prasangka buruk antar umat beragama khususnya di kalangan mitra ASEM di Asia dan Eropa.
143. KTT ASEM 5 juga telah menyetujui RI dan Republik Korea sebagai Koordinator ASEM-Asia yang akan dilaksanakan hingga KTT ASEM-6 di Finlandia tahun 2006. Bagi Indonesia, tugas menjadi Koordinator ASEM ini mempunyai arti penting dalam upaya meningkatkan kerjasama ASEM agar lebih berorientasi aksi dan selaras dengan kepentingan seluruh mitranya, termasuk Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai Koordinator ASEM-ASEAN, Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) ASEM-Asia di Bali tanggal 19-20 Desember 2004 dan *ASEM Coordinator's Meeting* tanggal 22 Desember 2004.

#### **Forum for East Asia and Latin America Cooperation (FEALAC)**

144. Dalam kerangka kerjasama FEALAC, Indonesia telah menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri ke-2 di Manila, Filipina, tanggal 30-31 Januari 2004. Dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri RI menyatakan pentingnya kerjasama FEALAC bagi ASEAN dan negara-negara di Asia Timur lainnya dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi. Indonesia mengharapkan agar interaksi kalangan bisnis kedua kawasan dapat lebih ditingkatkan melalui FEALAC, dan oleh karena itu Indonesia mendukung sepenuhnya pembentukan FEALAC *Business Council* yang diprakarsai oleh Republik Korea.
145. Indonesia juga telah berpartisipasi dalam "*Young Business Leaders' Encounters*" yang berlangsung di Tokyo pada bulan Februari 2004. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh pengusaha Usaha Kecil dan Menengah dari Denpasar. Indonesia juga ikut serta dalam Pertemuan Kelompok Kerja Politik dan Pendidikan FEALAC yang berlangsung di Singapura pada tanggal 9-10 September 2004.

#### **ASEAN Regional Forum (ARF)**

146. Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ARF ke-11 di Jakarta, 2 Juli 2004 telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang tercermin dalam *11<sup>th</sup> ARF Chairman's Statement*. Perumusan dokumen tersebut berlangsung melalui proses konsultasi yang alot, terutama untuk paragraf mengenai Semenanjung Korea, Myanmar, Irak, *Non-nuclear Proliferation Treaty*, dan masalah pembunuhan sandera sipil di Irak. Alotnya proses ini disebabkan oleh adanya berbagai pertentangan kepentingan dan tekanan domestik di beberapa negara peserta.
147. Pertemuan juga telah berhasil mensahkan beberapa dokumen lain, yaitu :
- a. *ARF Statement on Strengthening Transport Security against International Terrorism*
- Dokumen ini memuat kesepakatan negara-negara ARF untuk lebih memperkuat kerjasama di bidang keamanan transportasi laut untuk mencegah dan memerangi ancaman terorisme.
- b. *ARF Statement on Non-proliferation*
- Statement ini memuat kesepakatan negara-negara ARF untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan senjata pemusnah massal termasuk nuklir, biologi dan kimia. Namun demikian, Statement juga mengakui dan mendorong pemanfaatan energi nuklir untuk maksud-maksud damai.
148. Prestasi menonjol Indonesia sebagai Ketua ARF ke-11 adalah kehadiran Menlu Korea Utara dalam PTM ARF ke-11. Kehadiran tersebut menambah bobot pertemuan dimana semua pihak yang terlibat dalam *Six Party Talks* hadir, dengan demikian pembahasan mengenai Semenanjung Korea menjadi lebih berimbang. Selain itu, Pakistan telah diterima dan hadir sebagai peserta ARF ke-24.
149. Dalam rangka memperkuat kerjasama ARF, Pertemuan menyambut baik pembentukan Unit ARF di Sekretariat ASEAN. Dalam usianya yang ke-11 ARF sudah dapat memasuki tahapan diplomasi preventif dan disarankan agar merintis jalinan kerjasama dengan forum keamanan serupa di kawasan lainnya. Pertemuan mengakui arti penting konsep *ASEAN Security Community* yang digagas oleh Indonesia guna memperkuat ARF sebagai forum dialog politik dan keamanan di kawasan. Disamping itu juga disepakati berbagai agenda kegiatan ARF untuk kegiatan tahun 2004. Kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah diselenggarakannya *ARF Security Policy Conference (ASPC)* di Beijing 4-6 November 2004 dan *ARF Seminar on Regional Maritime Security* di Malaysia 22-24 September 2004 dimana Indonesia menjadi Ketua dalam dua pertemuan tersebut.
150. Negara-negara peserta ARF melihat semakin pentingnya forum ARF sebagai satu-satunya forum dialog di kawasan Asia Pasifik mengenai isu-isu politik dan keamanan. Hal ini tercermin dari pandangan para peserta untuk memajukan tahapan ARF dan menginstitutionalisasikan ARF, diantaranya melalui pembentukan ARF Unit di Sekretariat ASEAN yang terdiri staf-staf dari negara-negara ASEAN saja. Namun, sebagian peserta juga mengingatkan prinsip dasar ARF, yakni pentahapannya harus mempertimbangkan tingkat kenyamanan para peserta (*at a pace comfortable to all*).

151. Mengenai aplikasi peserta baru ARF, sesuai urutan pengajuan aplikasi, Timor Leste, Bangladesh, Srilanka dan Kazakhstan telah menyampaikan keinginannya untuk menjadi peserta ARF. Penerimaan mereka sebagai peserta baru ARF akan dilakukan secara *case-by-case*. Dalam hal ini, perhatian utama perlu ditujukan kepada aplikasi Timor Leste dalam ARF. Timor Leste berusaha menjadi peserta ARF, observer dalam ASEAN dengan harapan menjadi anggota ASEAN, dan akses TAC.

#### **Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)**

152. Upaya menyeimbangkan pola hubungan luar negeri yang selama ini diwarnai dengan kecenderungan ke arah globalisasi dilakukan dengan meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara lain dalam kerangka regional yang salah satunya melalui keanggotaan Indonesia dalam IOR-ARC. Dalam organisasi tersebut Indonesia menjadi koordinator untuk program kerja *Cross Border Financial Services*. Dalam rangkaian Pertemuan IOR-ARC yang dilaksanakan pada tanggal 21-27 Agustus 2004 di Kolombo, Sri Lanka, proyek *Cross Border Financial Services* usulan Indonesia telah mendapat respon positif dari para negara anggota yang selanjutnya akan segera ditindaklanjuti.

#### **Pacific Islands Forum (PIF)**

153. Sebagai upaya untuk semakin mendekatkan diri pada negara-negara di kawasan Pasifik, Indonesia telah menghadiri pertemuan *Post Forum Dialogue – Pacific Islands Forum (PFD-PIF)* ke-16 yang diselenggarakan di Apia, Samoa pada tanggal 9–10 Agustus 2004 sebagai mitra dialog. Pertemuan tersebut membahas berbagai masalah antara lain *Pacific Plan* kondisi keamanan dan politik regional (termasuk tentang perkembangan implementasi UU Otonomi Khusus Papua), *Milenium Development Goals (MDGs)*; *Small Economies Program under DDA*, Konvensi Tuna Pasifik Barat dan Tengah, *Preparation for Barbados Plan of Action (BPOA) 10 years Review*, serta bantuan kerjasama teknis untuk negara berkembang dan bantuan lainnya.
154. Pertemuan telah menghasilkan suatu Komunike Bersama yang berisikan kesepakatan untuk meningkatkan upaya-upaya dan kerjasama yang lebih erat dalam rangka pemberantasan kejahatan transnasional, peningkatan hasil sumber-sumber perikanan yang berkelanjutan, serta strategi regional mengenai HIV/AIDS. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia berhasil menjelaskan perkembangan keadaan di Papua yang dapat diterima dengan baik oleh anggota-anggota PIF sehingga isu Papua tidak tercantum dalam komunike akhir PIF.
155. Sebagai wujud nyata keaktifan dan keterlibatan Indonesia dalam kegiatan-kegiatan PIF, Indonesia tengah mengupayakan pemberian bantuan pelatihan teknis berupa pelatihan *micro finance* kepada negara-negara anggota PIF. Pemberian bantuan tersebut nantinya diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi upaya *capacity building* negara-negara anggota PIF sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan tersebut.

### **Southwest Pacific Dialog (SWPD)**

156. Kerjasama dengan negara-negara Pasifik Barat Daya dilakukan melalui keterlibatan Indonesia dalam forum SWPD dimana Indonesia menjadi salah satu negara pendiri. Pertemuan Tingkat Menteri SWPD ke-3 yang dilaksanakan di Adelaide, Australia pada tanggal 2-3 Desember 2004, membahas berbagai isu di bidang kerjasama pendidikan dan kebudayaan, terorisme, kejahatan lintas batas negara, serta tantangan-tantangan pembangunan dan menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain peningkatan hubungan antar parlemen maupun media masa di negara-negara anggota SWPD dan perlunya penguatan demokrasi dalam kehidupan masyarakat di kawasan. Negara-negara anggota SWPD juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia melaksanakan program beasiswa kebudayaan yang merupakan unsur penting dalam rangka memperkuat saling pengertian di antara negara anggota.
157. Pertemuan SWPD tersebut juga menyambut baik dan memberikan perhatian yang besar terhadap penyelenggaraan *Dialogue on Interfaith Cooperation* di Yogyakarta, tanggal 6-7 Desember 2004, yang melibatkan para tokoh dan pemimpin agama di kawasan ASEAN dan Pasifik Barat Daya. Tercermin adanya harapan yang besar agar pertemuan tersebut dapat menjadi momentum bagi terciptanya saling pengertian di antara para tokoh agama di kawasan yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi upaya penghapusan konflik dan penciptaan perdamaian di kawasan.

### **Asia Cooperation Dialogue (ACD)**

158. Dalam upaya memperkuat jaringan kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia, Indonesia berpartisipasi dalam kerangka kerjasama *Asia Cooperation Dialogue* (ACD) yang didirikan atas prakarsa Thailand. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ACD ke-3 di Qing Dao, China, tanggal 22 Juni 2004, telah dihasilkan beberapa kesepakatan penting, antara lain perlunya Asia untuk memiliki satu suara forum multilateral dan pentingnya kerjasama ekonomi dan perdagangan sebagai ujung tombak kerjasama ACD, termasuk pengkajian untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas.
159. Pertemuan juga menyepakati dokumen kerjasama energi *Qing Dao Initiative* mengenai peningkatan kerjasama bidang energi di antara negara anggota ACD yang meliputi pertukaran informasi, konservasi energi, pengembangan energi alternatif, transportasi energi, pembangunan pipa gas dan minyak, serta alih teknologi. Di samping itu telah disetujui pula dibentuknya Forum Kerjasama Energi di Asia.

### **Asian–African Sub-Regional Organization Conference (AASROC)**

160. Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan *Asian-African Sub Regional Organizations Conference* (AASROC) tanggal 29-30 Juli 2003 di Bandung, yang telah menyepakati perlunya kerjasama di bidang pengembangan SDM, pertanian, kerjasama investasi dan perdagangan Selatan-Selatan, keuangan, manajemen hutang dan kesehatan, pada tanggal

20 Agustus 2004 telah diselenggarakan AASROC II di Durban, Afrika Selatan yang dipimpin secara bersama oleh Menlu RI dan Menlu Afsel selaku *Co-Chairman*. Pertemuan dihadiri oleh 81 negara Asia dan Afrika, serta 5 organisasi regional dari kedua benua. Pertemuan ini mendukung hasil-hasil pertemuan *Working Group of AASROC I* yang berlangsung tanggal 24 Maret 2004 di Durban. Pertemuan AASROC II antara lain membahas kontribusi dari SRO di Asia-Afrika terhadap pengimplementasian *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP) untuk mencapai Asia-Afrika yang damai, sejahtera dan maju. Pertemuan juga mendukung penyelenggaraan KTT Asia-Afrika pada tanggal 21-22 April 2005 dan Peringatan 50 Tahun KAA 1955 pada tanggal 23 April 2005 di Bandung.

### **Kerjasama Ekonomi Sub-Regional**

161. Indonesia telah menyelenggarakan Pertemuan ke-12 Tingkat Pejabat Tinggi dan Pertemuan ke-9 Tingkat Menteri Kerjasama *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) di Balikpapan, 25-26 Nopember 2004. Dalam pertemuan yang bertema *Strengthening BIMP-EAGA Cooperation in Its Second Decade of Development by Public-Private Partnership* telah dicapai kesepakatan antara lain perlunya diadakan pertemuan tingkat menteri bidang transportasi, khususnya di bidang penerbangan dan lalu lintas laut, guna menunjang kegiatan perdagangan. Pertemuan tersebut juga memandang perlu disusunnya *Roadmap* yang berisi guideline serta indikator atas keberhasilan pelaksanaan kerjasama BIMP-EAGA sebagai upaya memfokuskan kerjasama BIMP-EAGA pada peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi. *Roadmap* ini diharapkan dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2005 untuk disahkan dalam PTM 2005 di Brunei Darussalam. Negara-negara mitra wicara seperti Australia, Jepang, China dan Korea telah mengemukakan komitmen mereka untuk membantu pengembangan BIMP-EAGA.

### **Kerjasama Penegakan Hukum Regional**

162. Indonesia bersama Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam telah menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* pada tanggal 29 November 2004. Perjanjian ini pada intinya menyatakan bahwa negara-negara di Asia Tenggara saling berjanji untuk bekerja sama memberikan bantuan hukum dengan cara mempermudah dan meningkatkan efektifitas upaya penegakan hukum melalui kerjasama upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan tersangka dalam masalah pidana. Diharapkan dari perjanjian ini, setiap negara dapat saling membantu dalam upaya meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan.

163. Tahun 2004 juga ditandai dengan semakin mencuatnya isu-isu baru internasional menyangkut masalah keamanan laut (*maritime security*) yang dikaitkan dengan terorisme. Akibatnya, Indonesia yang terletak pada posisi strategis untuk alur-alur pelayaran internasional, telah menjadi pusat perhatian internasional khususnya di perairan Selat Malaka. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia telah menyampaikan pandangannya yang menolak campur tangan asing atau internasionalisasi penanganan masalah keamanan di Selat Malaka. Berdasarkan hukum internasional, kedaulatan dan hak berdaulat atas Selat

Malaka berada pada negara pantai yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Indonesia juga mengingatkan masyarakat internasional bahwa meningkatnya kekhawatiran akan terorisme maritim harus disikapi secara proporsional dan tidak berlebihan, serta harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif.

164. Berita mengenai tingginya angka "*Piracy*" di Selat Malaka dilansir oleh *International Maritime Bureau* (IMB) atau, suatu LSM yang berkedudukan di London dan Kuala Lumpur. Laporan IMB ini bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 yang menggolongkan tindakan pencurian kecil-kecilan di pelabuhan sebagai suatu tindakan bajak laut (*piracy*). Sebagai contoh, dari 25 kasus pembajakan yang dilaporkan IMB, hanya 1 (satu) yang terjadi di laut dan 24 kasus lainnya terjadi di pelabuhan.
165. Laporan IMB yang condong bernuansa "*alarmist*" ini telah membuat citra Selat Malaka seolah-olah menjadi dipenuhi oleh bajak laut. Oleh karena itu, pengkaitan antara bajak laut dengan teroris di Selat Malaka juga semakin tidak relevan. Justru, dengan pelaporan yang tidak proporsional tersebut, teroris dikhawatirkan akan tertarik untuk melakukan kegiatan di Selat Malaka.
166. Dalam rangka pengamanan Selat Malaka dari berbagai tindak kriminal, Indonesia dalam hal ini TNI AL, telah melakukan peningkatan kegiatan patroli nasional secara lebih intensif dan patroli terkoordinasi atau *coordinated patrol* (Corpat) dengan Malaysia dan Singapura secara bilateral dan trilateral. TNI AL telah pula menerbitkan *hot lines* bagi pengguna Selat Malaka yang berada dalam kesulitan. Hasil kegiatan operasi tersebut menunjukkan suatu perkembangan positif, dimana jumlah tindak kriminal di Selat Malaka semakin menurun tajam.
167. Berkaitan dengan soal pengamanan laut, Indonesia telah menolak konsep *Proliferation Security Initiative* (PSI), yang memperbolehkan interdiksi kapal-kapal negara tertentu terhadap semua kapal yang dicurigai membawa senjata pemusnah massal dengan mengabaikan hukum internasional. Indonesia juga telah menolak gagasan serupa yang dikemas dalam bentuk *Regional Maritime Security Initiative* (RMSI). Bagi Indonesia, PSI dan RMSI bertentangan dengan hukum internasional.
168. Indonesia juga menolak kebijakan Australia tentang AMIZ (*Australian Maritime Identification Zone*). Indonesia menolak AMIZ karena hal itu melanggar hak kedaulatan penuh Indonesia di Laut Territorial dan perairan kepulauan Nusantara, serta hak yurisdiksi eksklusif Indonesia di kawasan maritim zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Jangkauan AMIZ seluas 1000 mil laut mencakup sebagian besar wilayah perairan Indonesia yakni Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Jawa, Selat Makasar, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Aru, dan Laut Arafuru. Bagi Indonesia, AMIZ juga melanggar Konvensi Hukum Laut 1982, dimana Indonesia dan Australia adalah Negara Pihak dalam Konvensi tersebut.
169. Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sama dengan masyarakat internasional termasuk Australia, dalam memerangi terorisme. Kedua negara telah bekerjasama secara erat dalam berbagai inisiatif memerangi terorisme pada fora bilateral, regional, dan multilateral. Namun demikian, Indonesia ingin menegaskan bahwa setiap

upaya untuk memerangi terorisme hanya dapat dilakukan dengan menghormati hukum internasional dan Piagam PBB sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi DK PBB 1456/2003 dan 1526/2004. Oleh karena itu, AMIZ adalah tindakan unilateral yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB.

#### D. MULTILATERAL

170. Dalam lingkup kerjasama multilateral, Indonesia terus mendukung upaya memajukan peran dan langkah-langkah PBB dalam rangka penegakan multilateralisme dan berperan aktif dalam berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup, penegakan HAM, penegakan hukum, penanggulangan terorisme, dan keamanan internasional.
171. Sebagai salah satu wujud dukungan untuk memajukan peran PBB yang lebih demokratis, Indonesia memiliki kepedulian besar terhadap reformasi badan dunia ini yang mencakup peningkatan sistem, akuntabilitas, dan efektifitasnya. Oleh karena itu, Indonesia telah secara aktif terlibat dalam proses reformasi PBB yang masih akan berlanjut. Dalam kaitan dengan reformasi ini, khususnya Dewan Keamanan (DK), Indonesia pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-59 tanggal 27 September 2004, telah menyatakan diri layak untuk dipertimbangkan indikasi pencalonannya sebagai anggota tetap DK PBB pada. Indikasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa komposisi keanggotaan dan keputusan DK PBB dewasa ini dinilai tidak mencerminkan situasi internasional saat ini karena kurangnya wakil kelompok negara berkembang dari kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin dan Karibia. Selain itu, Indonesia merupakan negara berkembang yang demokratis dan pluralistik terbesar ketiga di dunia, dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan mayoritas muslim yang jumlahnya juga terbesar di dunia. Disamping itu, Indonesia telah secara aktif berpartisipasi dalam berbagai inisiatif perdamaian PBB dan memberikan kontribusi bagi keamanan regional serta aktif dalam berbagai forum antara lain ASEAN, Gerakan Non-Blok (GNB), G-77, G-15, Organisasi Konferensi Islam (OKI), D-8 dan tindak lanjut Konferensi Asia Afrika. Pencalonan ini juga telah dicatat dalam dokumen akhir KTT ASEAN ke-10 di Vientiane.
172. Selain mengindikasikan kelayakannya sebagai anggota tetap DK PBB dalam kerangka reformasi PBB, Indonesia juga telah secara resmi mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2007–2008 yang proses pemilihannya akan dilakukan pada SMU PBB ke-61 pada tahun 2006.
173. Sebagai salah satu bukti komitmennya terhadap isu perlucutan senjata, Pemerintah RI diwakili oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri RI telah ditunjuk menjadi Ketua Sidang PrepCom III *The Seventh Review Conference of the Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang telah diselenggarakan di New York pada tanggal 26 April–7 Mei 2004. PrepCom III tersebut merupakan sidang yang terakhir sebelum dilangsungkannya Konferensi Peninjauan Ulang NPT ke-7 yang rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 2-27 Mei 2005. Kepercayaan yang diberikan masyarakat internasional tersebut tidak lepas dari *track record* Pemerintah RI yang dinilai baik dan selalu aktif dalam bidang pengaturan senjata (*arms control*) serta perlucutan senjata (*disarmament*).

174. Indonesia telah menandatangani naskah *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) yang isinya melarang seluruh jenis uji-coba nuklir dengan menggunakan metode ledakan. Traktat tersebut bermanfaat untuk mencegah proliferasi senjata-senjata nuklir, baik vertikal maupun horizontal. Meskipun masih membuka celah bagi bentuk-bentuk uji-coba nuklir super canggih yang dilakukan melalui teknik simulasi komputer tanpa melalui metode ledakan, Traktat ini merupakan hasil kompromi maksimal dari semua pihak terkait dan pada dasarnya tetap bermanfaat untuk memperkuat rezim non-proliferasi nuklir. Dalam kaitan ini, Indonesia sedang berupaya untuk segera menuntaskan proses ratifikasi CTBT mengingat manfaatnya yang akan membantu Indonesia dalam mengembangkan serta mempercanggih seluruh stasiun seismik yang ada di Indonesia sehingga diharapkan dapat dipergunakan untuk memantau dan memprediksi bencana alam yang sering terjadi di Indonesia.
175. Partisipasi aktif Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia telah ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam setiap Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) PBB melalui pengiriman Kontingen Garuda (Konga). Sejak UNEF I pada 1957, Indonesia telah mengirimkan 20 Konga, dengan mengerahkan lebih dari 13.700 personel. Namun demikian, di tengah semakin meningkatnya jumlah OPP PBB, peran serta Indonesia dalam OPP PBB selama beberapa tahun terakhir justru mengalami penurunan. Dalam kaitan ini, dipandang perlu pembentukan suatu Pusat OPP Nasional (National Peacekeeping Center) sebagai suatu mekanisme kerja yang melakukan fungsi koordinatif inter-departemen secara teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelatihan personel untuk mempersiapkan kontingen militer, polisi dan sipil dalam misi perdamaian PBB.
176. Sebagai keseriusan dalam penanggulangan terorisme, Indonesia telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada UN *Counter Terrorism Committee* (CTC) 1373 pada tanggal 12 Januari 2004. Laporan tersebut merupakan laporan tertulis ke-4 sejak tahun 2001, yang mencantumkan langkah-langkah implementasi lanjutan yang telah diambil Pemerintah RI dalam perlindungan sistem keuangan, mekanisme *counter-terrorism* dalam negeri, kepabeanan, imigrasi dan pengawasan perbatasan serta pengawasan terhadap akses teroris terhadap persenjataan.
177. Selain itu, sebagai salah satu upaya peningkatan kerjasama di kawasan dalam memerangi ancaman terorisme, Indonesia, bersama dengan Australia menyelenggarakan Pertemuan Regional tingkat Menteri Mengenai Pemberantasan Terorisme (*Bali Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism*) pada tanggal 4-5 Februari 2004 di Bali. Pertemuan Menteri tersebut telah menghasilkan *Co-Chairs' Statement* dengan rekomendasi dan mekanisme tindak lanjut. Ke-17 rekomendasi terdiri dari antara lain memperkuat kerangka kerja hukum, kerjasama diantara badan penegak hukum, memperkuat kapasitas, pentaatan terhadap ke-12 Konvensi PBB yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme, upaya bersama untuk menghentikan keuangan para teroris, mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan pengamanan di perbatasan, menggalakkan upaya untuk menanggulangi terorisme di udara dan di laut dan mendukung keterlibatan masyarakat bisnis dalam memerangi terorisme.
178. Terkait dengan Pertemuan tersebut, Pemerintah RI dan Australia sepakat untuk membentuk *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) yang bertujuan untuk membangun kapasitas badan-badan penegak hukum dalam memerangi kejahatan lintas

batas, dengan fokus utama pada terorisme. JCLEC yang berkedudukan di lokasi Akademi Kepolisian Semarang ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI pada tanggal 3 Juli 2004. Program pertamanya adalah kursus mengenai *the post-blast crime scene management* yang telah dihadiri oleh 30 peserta dari negara-negara Asia Pasifik. Program kedua yang berakhir bulan Desember 2004 bertemakan *International Management for Serious Crime* (IMOSC) dan diikuti oleh 22 peserta dari 17 negara.

179. Berbagai kerjasama internasional dalam upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah dilakukan oleh Indonesia, baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Kerjasama bilateral diantaranya adalah Dialog Indonesia-Norwegia mengenai HAM yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4-5 Mei 2004 dan Dialog Indonesia-Kanada mengenai HAM yang diselenggarakan di Ottawa pada tanggal 31 Agustus-1 September 2004. Di Asia Tenggara, Indonesia berperan aktif dalam upaya pemajuan HAM antara lain dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Lokakarya Mekanisme HAM ASEAN yang pertama pada tahun 2001 dan yang Keempat pada bulan Juni 2004.
180. Indonesia terpilih menjadi anggota Komisi HAM (KHAM) periode 2004 sampai dengan 2006 dan pada Sidang KHAM ke-60 yang lalu telah membuktikan peran aktifnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM di forum PBB. Pada Sidang KHAM ke-60 tersebut, khusus masalah HAM di Timtim tahun 1999 telah berhasil digeser dari isu pelanggaran HAM berat menjadi isu kerjasama teknis antara Kantor KT-HAM dan Pemerintah Timor Leste. Pada saat pencalonan Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Dr. Makarim Wibisono, menjadi Ketua Sidang KHAM ke-61 tahun 2005 mewakili kelompok Asia, Indonesia mendapatkan dukungan yang luas. Dalam pemilihan yang berlangsung tanggal 17 Januari 2005 di Jenewa, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, telah terpilih sebagai Ketua Komisi HAM PBB untuk tahun 2005 dan secara resmi mengambil alih kepemimpinan dari ketua sebelumnya, Dubes Mike Smith dari Australia.
181. Pada tanggal 13 Januari 2004, delegasi RI telah menghadiri Sidang Ke35 Komite Hak Anak guna membahas Laporan Pertama dan Kedua Pemerintah RI berkaitan dengan implementasi nasional Konvensi Hak Anak periode 1993-Juni 2000 dan laporan tambahan Laporan Periodik Kedua periode Juli 2000-Oktober 2003. Dalam pembahasan tersebut, delegasi RI memaparkan berbagai upaya terkini, baik upaya legislatif, administratif maupun upaya nyata yang telah ditempuh Pemerintah RI dalam memajukan dan melindungi hak-hak anak di Indonesia. Kemajuan di bidang legislasi nasional yang monumental adalah berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip dan berbagai peraturan yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
182. Guna memasyarakatkan perkembangan internasional di bidang HAM kepada publik domestik di Indonesia dan sekaligus mendorong peningkatan tanggung-jawab sektor bisnis di bidang pemajuan dan perlindungan HAM, Departemen Luar Negeri RI sebagai pelaksana tugas pembangunan nasional di bidang hubungan dan politik luar negeri telah menyelenggarakan Lokakarya Nasional bertema "Peran Sektor Bisnis dalam Penghormatan, Pemenuhan, Pemajuan dan Perlindungan HAM di Indonesia" pada tanggal 20-21 Desember 2004.

183. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk meratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) sebagaimana tercantum pada Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun 2004-2009. Untuk itu Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan instansi terkait telah melakukan kajian dan menyusun draft RUU ratifikasi dua kovenan internasional tersebut. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Menteri Luar Negeri telah menyampaikan surat kepada Presiden RI mengenai permohonan tindak lanjut pemrosesan ratifikasi kedua kovenan tersebut kepada DPR.
184. Terkait dengan pemenuhan kewajiban sebagai negara pihak pada berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, pada tahun 2004 ini Departemen Luar Negeri RI telah memfasilitasi penyusunan laporan kombinasi laporan periodik keempat dan kelima (periode 1995 - 2003) dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) dan kombinasi laporan awal dan laporan periodik pertama dari Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Racial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD*). Diharapkan laporan CEDAW dapat disampaikan ke *Treaty Body* pada awal tahun 2005, sedangkan laporan CERD masih dalam proses pembahasan antar Departemen. Untuk mengatasi keterlambatan penyampaian pelaporan periodik Indonesia, Departemen Luar Negeri RI sedang memfasilitasi suatu mekanisme nasional pelaporan sebagaimana diatur dalam RAN HAM RI 2004 - 2005.
185. Sesuai dengan komitmen untuk melaksanakan perlindungan dan pemajuan HAM buruh migran dan membenarkan mekanisme nasional guna menjamin perlindungan TKI, Pemerintah RI telah menandatangani *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* pada kesempatan *Treaty Event* Sidang Majelis Umum ke-59 PBB, September 2004. Penandatanganan ini merupakan suatu usaha menuju realisasi salah satu butir RAN HAM Ke-2 (2004-2009) yang telah menetapkan ratifikasi Konvensi ini menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2005. Untuk ikut membahas berbagai masalah HAM buruh migran di Asia, Indonesia, sebagai negara pengirim tenaga kerja terbanyak ke luar negeri, telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah pada *Third Labour Migration Ministerial Consultations for Countries of Origin in Asia* tahun 2005 setelah dua pertemuan sebelumnya dilaksanakan di Colombo dan Manila.
186. Pemerintah RI telah menyatakan akan meratifikasi Revisi Konvensi No. 185 tentang *Seafarers' Identity Documents* yang akan berlaku efektif mulai Maret 2005. Pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri berjumlah sekitar 130.000 orang atau kedua terbesar di dunia setelah Filipina. Negara-negara UE yang merupakan penyerap tenaga pelaut Indonesia akan meratifikasi Konvensi ini pada akhir tahun 2005. Agar pelaut Indonesia mendapat akses atau tidak dipersulit di AS dan negara-negara Barat, pada tanggal 14 Oktober 2004 Pemerintah RI telah menyatakan untuk meratifikasi Konvensi dimaksud.

187. Pemerintah RI telah menominasikan masyarakat Propinsi Riau dalam menanggapi tawaran untuk ikut serta dalam nominasi *The Nansen Refugee Award 2005* di Jenewa. Pencalonan tersebut dikaitkan dengan peran penting masyarakat Propinsi Riau dalam penanganan masalah kemanusiaan para pengungsi dari Vietnam di Pulau Galang pada tahun 1970-an dan bantuan mereka dalam proses repatriasi serta relokasi sekitar 250 ribu pengungsi mulai tahun 1980-an hingga berakhirnya proses tersebut pada tahun 1996.
188. Dalam rangka mendukung kegiatan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama Pemerintah RI, Departemen Luar Negeri RI menyelenggarakan Seminar Anti Korupsi pada bulan September 2004 dengan tujuan untuk mensosialisasikan Konvensi PBB Menentang Korupsi. Salah satu rekomendasi penting seminar tersebut adalah perlunya Indonesia memiliki Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Rekomendasi tersebut telah dimasukkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi yang telah ditandatangani oleh Presiden RI bertepatan dengan hari internasional pertama menentang korupsi pada tanggal 9 Desember 2004.
189. Di tingkat regional, pada tanggal 15 Desember 2004, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan institusi Pemberantasan Korupsi dari 5 negara ASEAN lainnya yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina sebagai wujud dari kerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi.
190. Pemerintah RI memberikan perhatian serius pada isu pemberantasan kejahatan lintas negara terorganisir, termasuk isu pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik melalui peningkatan kerjasama di tingkat nasional, regional dan internasional. Namun, berbagai kemajuan yang dicapai belum sepenuhnya diakui pada tingkat internasional khususnya mengenai kepatuhan terhadap standar kerjasama internasional di bidang pencucian uang. Dalam kaitan ini, *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* telah mengeluarkan 40 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 9 rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme, termasuk diantaranya 1 rekomendasi khusus tentang *Cash Couriers* yang baru dikeluarkan FATF pada sidang pleno bulan Oktober 2004 yang lalu.
191. Sehubungan dengan perkembangan dan keberhasilan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai kloning, khususnya berkaitan dengan kloning manusia, pada tanggal 14 Oktober 2004, Departemen Luar Negeri RI telah mengadakan rapat kerja interdep mengenai "Posisi Indonesia menghadapi pembahasan masalah Kloning Manusia pada Sidang Majelis Umum PBB ke-59/2004". Raker tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi diantaranya 1) Indonesia mendukung larangan *reproductive cloning of human beings* yang secara etika tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan martabat kemanusiaan, 2) Indonesia mendukung kegiatan *therapeutic cloning*, penelitian embrio, dan penelitian *stem cells* sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan moral yang diatur oleh hukum nasional oleh masing-masing negara; dan 3) Menetapkan regulasi nasional yang kokoh dan memberikan kepastian hukum dalam masalah tersebut.

192. Pertemuan Tingkat Menteri Komite mengenai Palestina Gerakan Non-Blok (GNB) berlangsung di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 13 Mei 2004 dan dihadiri oleh 21 negara. Pertemuan menghasilkan *Joint Communique of the Ministerial Meeting of the Committee on Palestine of the Non-Aligned Movement*. Dalam kaitan itu, Ketua Delegasi RI menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh kebijakan politik guna menyelesaikan konflik di Palestina seperti pengiriman pasukan perdamaian PBB, pembentukan delegasi tingkat Menteri, serta pelaksanaan resolusi-resolusi PBB mengenai Palestina. Disampaikan pula bahwa GNB sebagai kekuatan moral dan politik yang kuat dengan potensi yang besar dalam dunia diplomasi hendaknya memanfaatkan kedudukan tersebut dalam dukungannya kepada Palestina sesuai prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok.
193. Untuk melakukan kaji ulang atas berbagai isu pasca penyelenggaraan KTT GNB ke-13 dan membahas isu-isu penting diantaranya multilateralisme, penguatan peran PBB, terorisme internasional, situasi konflik di berbagai kawasan, penghapusan dan non-proliferasi senjata pemusnah misal, telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri GNB di Afrika Selatan, tanggal 17 – 19 Agustus 2004 yang mengambil tema "*Challenges of Multilateralism in the 21<sup>st</sup> Century*". Penetapan tema KTM tersebut menunjukkan perhatian negara-negara anggota GNB terhadap tantangan-tantangan multilateralisme yaitu kecenderungan munculnya tindakan unilateral dari kekuatan hegemoni dunia yang membahayakan semangat multilateralisme dan kinerja PBB. Hal ini menyebabkan berkurangnya perhatian masyarakat internasional terhadap masalah kemiskinan dan keterbelakangan, pemulihan dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta restrukturisasi distribusi kekuasaan internasional. Berkaitan dengan hal itu, Sidang juga membahas isu-isu spesifik seperti restrukturisasi, revitalisasi dan demokratisasi PBB, operasi pemeliharaan perdamaian. KTM menghasilkan Dokumen Akhir *Durban Declaration on Multilateralism, Declaration on Palestine* dan *Declaration on Gatumba Masacre*. Hasil-hasil sidang yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut memuat sikap dasar GNB terhadap masalah-masalah yang menonjol yang menjadi kepentingan bersama negara-negara anggota GNB dan langkah-langkah untuk menyelesaikannya sesuai dengan komitmen dan tujuan GNB.
194. Pada Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Konferensi Islam (KTM OKI) ke-31 di Istanbul, Turki tanggal 14-16 Juni 2004, rancangan resolusi (ranres) yang menyangkut kepentingan Indonesia, terutama masalah Filipina Selatan, telah disahkan dengan isi yang telah memenuhi harapan Indonesia. KTM tersebut juga telah memutuskan bahwa fase I implementasi Perjanjian Damai 1996 telah selesai serta mendesak Pemerintah Filipina dan MNLF untuk melanjutkan pelaksanaan fase II yang sedang berjalan. Berkaitan dengan pelaksanaan International Conference of Islamic Scholar (ICIS) di Jakarta, KTM sepakat untuk memasukkan hasil penyelenggaraan konferensi tersebut dalam Komunike Akhir sehingga diharapkan dapat lebih memberikan bobot bagi pentingnya inisiatif ICIS dalam rangka mempererat kerjasama para cendekiawan Muslim di lingkungan OKI.
195. Pemerintah RI telah menandatangani *Cooperation Arrangement* dengan *International Organisation for Migration* (IOM) pada tanggal 4 Oktober 2000 dalam upaya mengatasi masalah masalah yang berkait dengan migrasi. Dalam *Cooperation Arrangement* tersebut IOM memiliki mandat sebagai berikut: 1) masalah IDP (*internally displaced persons*), 2) keimigrasian umum, 3) perlindungan TKI diluar negeri dan 4) penciptaan suatu sistim

manajemen perbatasan (*border management system*). *Arrangement* tersebut terakhir telah diperpanjang kembali pada tanggal 14 Oktober 2004 untuk periode 2 (dua) tahun ke depan.

196. Saat ini Indonesia menjadi anggota di lebih dari 170 organisasi internasional. Jumlah kewajiban kontribusi Pemerintah RI sehubungan dengan partisipasinya dalam keanggotaan pada organisasi internasional untuk tahun 2004 adalah sebesar ± Rp. 140 milyar. Alokasi APBN 2004 bagi pembayaran kontribusi tersebut yang dimasukkan dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) Departemen Luar Negeri RI adalah Rp. 50.800.000.000,- (35% dari kewajiban kontribusi). Sesuai dengan mandat Keppres, Kelompok Kerja (Pokja) yang dipimpin oleh Dirjen Multilateral Palsoskam Departemen Luar Negeri RI, dengan anggota terdiri dari unsur Deplu, Depkeu, Setneg dan Setkab, bertugas dan berwenang untuk melakukan pengkajian atas keanggotaan dan kontribusi RI pada organisasi internasional minimal sekali setahun dengan menggunakan analisa *cost and benefit*.
197. Pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan penghargaan dan kepercayaan masyarakat internasional menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan ke-29 *Inter Agency Procurement Working Group* (IAPWG). Pertemuan berlangsung di Yogyakarta tanggal 31 Mei–4 Juni 2004 dan diikuti oleh 42 Kepala Divisi/Bidang pengadaan dari 28 organisasi dalam sistem PBB untuk membahas program pengadaan tahunan barang dan jasa PBB yang bernilai sekitar US\$ 4,6 milyar. Bersamaan dengan pertemuan tersebut juga diselenggarakan beberapa kegiatan yang melibatkan pengusaha nasional dan ditujukan sebagai ajang promosi produk mereka dan membantu peran dunia usaha Indonesia dalam memasok kebutuhan barang dan jasa PBB. Serangkaian kegiatan tersebut berupa “Forum Bisnis”, “*One-in-One Business Meeting*”, “Displai Produk Indonesia” yang berlangsung antara tanggal 1-3 Juni 2004.
198. Dalam upaya memerangi kemiskinan, Indonesia juga ikut berperan pada tingkat global. Melalui “*the United Nations Department for Economic and Social Affairs (UN-DESA)*”, Sekretariat PBB memandang perlu adanya dialog substantif tentang strategi pertumbuhan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan yang secara khusus difokuskan pada pembangunan pemuda. Oleh karena itu diselenggarakan lokakarya bertajuk “*Workshop on Youth in Poverty*” guna membahas masalah tersebut yang berlangsung di Indonesia (Yogyakarta) tanggal 2–5 Agustus 2004. Pemilihan Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan tak lepas dari pencapaian Indonesia sebagai salah satu dari 9 “*champion countries*”, yang secara sukarela terlibat dalam program kegiatan Sekretaris Jenderal PBB mengenai “*Youth Employment Network*”. Rekomendasi dari Lokakarya tersebut akan menjadi bahan masukan bagi penyusunan “*the World Youth Report 2005*” yang akan dibahas pada SMU PBB ke-60 tahun 2005.
199. Selain memerangi kemiskinan dunia melalui pembangunan pemuda, PBB juga mengupayakan penanggulangan kemiskinan melalui penciptaan pendapatan bagi masyarakat dan tersedianya lapangan kerja melalui peningkatan peran *microcredit*. *Microcredit* merupakan model bisnis swadaya keuangan yang efektif dan memiliki fungsi sosial–ekonomi untuk memberikan kesempatan penuh kepada masyarakat luas, terutama kalangan pengusaha kecil dalam berpartisipasi di sektor keuangan secara produktif, yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Tahun 2005 telah disepakati sebagai “*International Year of Microcredit*” oleh SMU-PBB. Hal ini menunjukkan

pengakuan atas peran *microcredit* sebagai suatu bagian tidak terpisahkan dari upaya kolektif global untuk mengurangi setengah porsi penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2015. Guna menyukseskan kegiatan Tahun Kredit Mikro ini, Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari Komisi Nasional ikut berperan dalam menyusun strategi inklusif dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pendukung terkait.

200. Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2004, Departemen Luar Negeri memprakarsai dan berperan dalam memfasilitasi bantuan internasional bagi penyelenggaraan Pemilu. Sebagai salah satu hasilnya ditandatangani MoU antara Pemerintah RI yang diwakili Kementerian Koordinator Perekonomian dan UNDP sebagai *coordinating agency* bantuan luar negeri tanggal 25 April 2003. Bantuan ini diarahkan pada tiga peran pokok, yaitu: mendukung *Capacity Building* KPU baik di tingkat propinsi dan kabupaten, mendukung KPU dalam melaksanakan *voter education* dan program-program penyebarluasan informasi, dan mendukung kebutuhan perlengkapan/perangkat keras pendukung. Pelaksanaan Pemilu yang secara umum berlangsung lancar dan aman serta mendapatkan pengakuan dan apresiasi masyarakat internasional tersebut telah disampaikan pula oleh Menlu pada kesempatan sesi debat umum Sidang Majelis Umum-PBB ke-59. Dalam kesempatan tersebut Menlu menyampaikan bahwa Pemilu 2004 di Indonesia merupakan "*national political exercise*" yang telah berlangsung secara *peaceful, fair and democratic*.
201. Terkait peran Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), Indonesia telah menyelenggarakan Sidang ke-3 *High Level Open-ended Intergovernmental Working Group on Intergovernmental Strategic Plan for Technology Support and Capacity Building*, yang berlangsung di Jimbaran, Bali, pada tanggal 2-4 Desember 2004. *Working Group* tersebut dibentuk oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) melalui Sidang Khusus *Governing Council* (GC) tahun 2004 guna menyusun program aksi strategis mengenai dukungan teknologi dan pengembangan kemampuan kepada negara-negara berkembang dan negara-negara dalam transisi ekonomi. Dalam sidang ke-3 tersebut telah berhasil disusun *Bali Strategic Plan* yang memuat identifikasi sejumlah kegiatan mengenai dukungan teknologi dan pengembangan kemampuan yang dibutuhkan oleh negara berkembang dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan mencapai target-target *Millennium Development Goals* yang perlu disahkan dalam GC UNEP ke-23 di Nairobi akhir Februari 2005. Penyelenggaraan sidang ke-3 ini diharapkan dapat memperkokoh profil diplomasi Indonesia dalam isu pembangunan berkelanjutan di tingkat global, mengingat *Bali Strategic Plan* merupakan "*milestone*" bagi kepentingan negara berkembang dalam menindaklanjuti hasil-hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan.
202. Lebih jauh, dalam rangka menindaklanjuti *Bali Strategic Plan* tersebut, Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan kerjasama dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI) dengan UNEP pada tanggal 3 Desember 2004. Dalam LoI tersebut, Pemerintah Indonesia melalui *Non-Aligned Movement Center for South-South Technical Cooperations* (NAM CSSTC) sebagai badan pelaksana akan mengadakan kerjasama teknis dengan UNEP guna memfasilitasi Kerjasama Selatan-Selatan dalam rangka mengintegrasikan komponen lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

203. Upaya Indonesia memperkuat kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik juga dilakukan dalam kerangka PBB melalui *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UN-ESCAP). Beberapa perkembangan kerjasama Indonesia dalam kerangka UN-ESCAP antara lain, pertama, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya telah menandatangani *Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network* pada bulan April 2004 tentang pengembangan rute dan jaringan jalan raya di kawasan Asia. Kedua, Indonesia ikut serta dalam proses pengembangan jaringan kereta-api *regional Trans Asian Railway*. Ketiga, Indonesia telah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan *High Level Intergovernmental Meeting on Sustainable Tourism Development in Asia and the Pacific* pada bulan November 2005. Keempat, pengembangan proyek energi terbarukan melalui kerangka *pro-poor public partnership* di Desa Cinta Mekar, Jawa Barat. Kelima, revitalisasi pusat penelitian palawija UN-ESCAP yang berkedudukan di Bogor, Indonesia, melalui perubahan nama dari CGPRT *Centre* menjadi *Centre for Alleviation of Poverty through Secondary Crops Development* (CAPSA) dengan penekanan mandat pada upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan palawija. Keenam, Indonesia direncanakan menjadi penyelenggara Sidang Komisi ESCAP ke-62 tahun 2006. Hal ini mencerminkan pengakuan internasional terhadap situasi yang kondusif di tanah air serta peranan internasional Indonesia.
204. Dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), Indonesia menyambut baik Keputusan Dewan Umum WTO pada akhir bulan Juli 2004 yang berhasil mensahkan Program Kerja Doha (Paket Juli). Keputusan tersebut menyepakati kerangka perundingan isu-isu utama, yaitu bidang pertanian, akses pasar produk non-pertanian, isu-isu pembangunan dan implementasi, serta *trade facilitation*. Indonesia berpendapat bahwa keputusan tersebut telah menghidupkan kembali perundingan Putaran Doha dan mengharapkan agar negara-negara maju memberikan perhatian yang lebih besar kepada isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang serta mendorong dicapainya suatu kesepakatan yang seimbang.
205. Sementara itu, melalui *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) Indonesia ikut berperan aktif dalam Konperensi UNCTAD XI di Sao Paulo, Brazil, pada bulan Juni 2004. Dalam konperensi tersebut, UNCTAD berhasil meluncurkan putaran ketiga perundingan *Generalised System on Trade Preferences* (GSTP). Indonesia menyambut baik peluncuran tersebut mengingat perundingan melalui GSTP merupakan langkah konkrit peningkatan kerjasama Selatan-Selatan dan diharapkan dapat menguntungkan semua pihak, serta dapat meningkatkan posisi negara-negara berkembang secara politis dan ekonomi.
206. Sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam memajukan pembangunan Industri, Pemerintah telah berhasil memperoleh *Country Service Framework for Indonesia* (CSFI) yang merupakan payung berbagai bantuan dan kerjasama teknik *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO). Sebagai salah satu perwujudan bantuan tersebut, pada bulan Mei 2004 telah ditandatangani MoU yang berisi kesepakatan Gubernur se-Sulawesi tentang Program Aksi Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi 2003-2004. Program aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kerjasama Indonesia dan UNIDO dalam membantu pembangunan sektor industri di Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya di sektor agro-industri dan perikanan. Saat ini Pemerintah Indonesia dan UNIDO

sedang menjajagi kemungkinan perpanjangan waktu pelaksanaan CSFI yang seharusnya berakhir tahun 2004 menjadi tahun 2005-2007.

207. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai badan lembaga internasional yang berkaitan dengan bidang komoditi dan standardisasi yang mencakup komoditi pangan dan pertanian; kehutanan, perkebunan, kelautan dan pertambangan serta upaya pemerintah Indonesia untuk memajukan standar nasional yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan/standar yang berlaku dalam dunia internasional.
208. Dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pangan dan pertanian, Pemerintah Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap aliansi global untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan di dunia. Aliansi global meliputi peningkatan bantuan internasional bagi negara-negara berkembang melalui perluasan akses pasar, teknologi pertanian, investasi di bidang pertanian dan menghilangkan segala bentuk hambatan guna meningkatkan ketahanan pangan dunia. Dukungan tersebut telah dipertegas kembali pada pertemuan Konferensi Regional FAO untuk kawasan Asia-Pasifik yang diselenggarakan di Beijing pada tanggal 17-21 Mei 2004, termasuk komitmen Indonesia terhadap Deklarasi WFS dan upaya untuk memenuhi pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs).
209. Di bidang kehutanan dan perkebunan, keanggotaan Indonesia dalam *International Tropical Timber Organization* (ITTO), organisasi komoditi yang beranggotakan negara-negara produsen dan konsumen kayu tropis telah dimanfaatkan untuk memasukan elemen *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG) ke dalam *International Tropical Timber Agreement* (ITTA) yang baru untuk mengatasi masalah *Illegal logging* dan *Illegal Timber Trade*. Selain itu, bersama-sama dengan negara-negara produsen kayu tropis lainnya, Indonesia terus berupaya menggalang *lobby* menentang keinginan kelompok konsumen untuk merubah ITTO menjadi organisasi hutan tropis dan memasukkan elemen jasa lingkungan ke dalam ITTA yang baru. Di samping itu, Indonesia mendesak perlunya mekanisme baru kontribusi sukarela, karena mekanisme yang ada sekarang belum dapat diterapkan sepenuhnya untuk mendukung program pengelolaan hutan secara berkesinambungan (*Sustainable Forest Management/SFM*).
210. Perkembangan komoditi perikanan dunia saat ini ditandai beberapa isu dominan, antara lain, perubahan peraturan atas pengawasan mutu dan keselamatan pangan (*food safety*) di negara importir, penerapan persyaratan baru di bidang *labelling*, munculnya konsep *traceability* di beberapa negara maju; keprihatinan masyarakat dunia terhadap over-eksploitasi sumber daya perikanan tertentu, terutama *groundfish*; masalah kelangsungan (*sustainability*) sumberdaya perikanan budidaya; penangkapan liar (*illegal, unreported and unregulated fishing*); dan perundingan perdagangan dunia dalam kerangka WTO, khususnya *Market Access for Non-Agricultural Products* (MANAP) dan subsidi di bidang perikanan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia memandang perlu pengembangan standardisasi secara transparan dan adil, peningkatan program bantuan teknis, dan pengembangan *capacity building* untuk membantu negara eksportir/negara berkembang dalam mengembangkan keahlian dan peralatan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar tersebut.

211. Upaya implementasi Persetujuan Hambatan Teknis terhadap Perdagangan (*Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*) – *World Trade Organization (WTO)*, telah ditandai dengan kerjasama antara *International Organization for Standardization (ISO)* dan *WTO* dalam kemitraan strategis guna peningkatan sistem perdagangan global yang lebih adil dan bebas melalui mekanisme kebijakan standardisasi. Terkait dengan hal tersebut, salah satu kesulitan yang dihadapi para pelaku ekonomi di negara berkembang dalam produksi, pertukaran barang dan jasa, serta konsumsi produk yang berkualitas dan aman, adalah lemahnya prasarana standar. Mengingat anggota *ISO* dapat bekerjasama dalam penyediaan pedoman, keahlian dan *capacity building* kepada negara-negara berkembang yang membutuhkan, maka Indonesia sebagai salah satu anggota *ISO* dapat memanfaatkan posisinya untuk lebih berperan dalam menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang tersebut.
212. Dalam tahun 2004 ini, Indonesia juga aktif terlibat dalam kerjasama multilateral di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan di luar kerangka PBB. Dalam kerangka Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-31 yang diselenggarakan di Istanbul, Turki pada tanggal 14 – 16 Juni 2004 dan dihadiri oleh para wakil dari 57 negara anggota OKI termasuk 34 Menteri, 9 Peninjau (*Observers*) serta 32 Tamu (*Guests*). Dalam KTM tersebut dibahas isu-isu ekonomi a.l. mengenai perlunya kesetaraan dan transparansi dalam perdagangan katun dunia, perlunya pembentukan *Voluntary Pan-Islamic Fund* dalam mendukung perkembangan iptek negara anggota OKI, penyelenggaraan *the 1<sup>st</sup> Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC) Technical Conference* tanggal 4-7 Oktober 2004, serta *OIC Economic (Ministerial) Conference* pada bulan November 2004. Sementara isu-isu pokok di bidang budaya a.l. mengenai pembentukan *the Islamic Conference Youth Forum* sebagai wadah dalam meningkatkan kerjasama kepemudaan OKI, penyelenggaraan *World Summit on the Information Society* dan *1st Islamic Solidarity Games* pada tahun 2005.
213. Sementara dalam Sidang Tingkat Menteri ke-20 Komite Tetap Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan OKI (COMCEC-OKI) di Istanbul Turki tanggal 23-27 November 2004, Indonesia bersama Qatar dan Sierra Leone terpilih sebagai Wakil Ketua (*Vice Chairman*) lembaga subsider OKI di bidang ekonomi tersebut, masing-masing mewakili kelompok Asia, Arab, dan Afrika.
214. Dalam kerangka *Developing-8 (D-8)*, Indonesia juga berpartisipasi dalam KTT ke-4 D-8 di Teheran tanggal 18 Pebruari 2004. Dalam KTT tersebut telah dihasilkan Deklarasi Teheran yang intinya memuat komitmen dan kesepakatan negara-negara anggota D-8 untuk lebih meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. KTT juga menyepakati rencana pembentukan persetujuan di bidang perdagangan, yaitu *Preferential Trade Agreement* dan *Mutual Administrative Assistance in Custom Matters*, serta penunjukan Indonesia sebagai Ketua D-8 periode tahun 2006-2007 dan sekaligus Tuan Rumah KTT Ke-V tahun 2006. Kesediaan Indonesia menjadi Ketua D-8 tersebut merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap kerjasama dan solidaritas antar negara anggota D-8.
215. Indonesia juga telah berpartisipasi pada pertemuan *D-8 Council of Minister* (tingkat Menlu) yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2004 di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Pertemuan *Council* diadakan untuk mengevaluasi perkembangan kerjasama D-8 sejak

berlangsungnya KTT di Teheran dan menegaskan kembali komitmen kerjasama yang telah dituangkan dalam Deklarasi Teheran. Disamping itu, para Menteri Luar Negeri D-8 juga menyepakati perlunya untuk merevitalisasi D-8 dan menyusun program kerjasama yang lebih terarah, dapat dilaksanakan dan membawa manfaat langsung bagi pembangunan nasional negara anggota.

216. Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap kerjasama D-8, Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan ke-3 *D-8 High Level Trade Official* di Jakarta pada tanggal 9-11 Oktober 2004. Pertemuan tersebut telah menyelesaikan pembahasan rancangan *Agreement on Mutual Administrative Assistance in Custom Matters* dan menyelesaikan sejumlah besar klausul rancangan *Preferential Trade Agreement*. Persetujuan-persetujuan tersebut ditujukan sebagai upaya untuk memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggota D-8.
217. Dalam kerangka Kelompok G-15, pada KTT G-15 di Venezuela, tanggal 27-28 Februari 2004, Indonesia bersama-sama negara anggota G-15 telah menyepakati komunike dan deklarasi bersama tentang perlunya penguatan kerjasama di segala bidang di antara negara anggota G-15. Sesuai dengan kesepakatan tersebut, kerjasama G-15 terutama akan lebih difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi dan pembangunan di antara negara-negara anggota.
218. Indonesia bersama-sama dengan negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) secara khusus membahas kecenderungan tindakan unilateralisme oleh kekuatan hegemonik dunia serta kurangnya perhatian masyarakat internasional terhadap masalah-masalah seperti pembangunan, kemiskinan dan penghapusan hutang, kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Oleh karena itu dalam KTM GNB di Durban pada bulan Agustus 2004 diamanatkan agar dunia kembali pada upaya multilateralisme dalam ekonomi dunia yang kondusif bagi penciptaan pemerataan kesempatan dengan mengutamakan implementasi hasil konferensi utama PBB di bidang ekonomi dan sosial.
219. Indonesia memandang Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang (KTNB) sebagai bagian penting dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pada tahun 2004. Pemerintah Indonesia, bekerjasama dengan donor seperti UNDP, JICA, ESCAP, telah menawarkan 12 program KTNB kepada negara-negara berkembang, 8 di antaranya telah dilaksanakan dan sisanya akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Program-program KTNB yang ditawarkan meliputi bidang peternakan, pertanian, kesehatan, kehutanan, pendidikan, energi, pengentasan kemiskinan, perumahan, dan keuangan.
220. Dalam kerangka GNB, *NAM Center for South-South Technical Cooperation* (NAM-CSSTC) yang dibentuk tahun 1995 dan operasinya berada di bawah supervisi Deplu, telah aktif menggalang kerjasama dengan pihak donor seperti IDB dan JICA dalam melaksanakan beberapa program pelatihan. Beberapa di antaranya adalah "*Appropriate Mechanization and Water Management for Dry Land Agriculture*" pada bulan Februari dan Maret 2004, "*Expert Meeting on Formulating Manual for Micro Credit*" pada tanggal 8-12 Maret 2004, "*Third Country Training Programme on Implementing the Manual E-Readiness for African Region*", "*Third Country Training Programme on Micro Finance for African Region*", serta "*Three*

*Weeks Trade Policy Course for OIC Members Countries*” di Jakarta pada tanggal 27 September – 15 Oktober 2004.

221. Indonesia juga aktif berperan dalam kerjasama bidang Pariwisata. Sebagai anggota Dewan Eksekutif *World Tourism Organization* (WTO) periode 2003-2007, Indonesia menilai bahwa kerjasama dalam WTO perlu lebih ditingkatkan agar lebih mengembangkan pariwisata dunia. Industri pariwisata merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif untuk melindungi lingkungan dan warisan sejarah serta mempromosikan perdamaian dan saling pengertian di antara negara-negara. Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam organisasi pariwisata di tingkat regional seperti *Pacific Asia Travel Association* (PATA), *Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) dan *Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle* (IMT-GT).
222. Dalam kerangka kerjasama keuangan antara Indonesia dengan CGI, pertemuan *Mid-Term Review* CGI yang dihadiri 30 wakil dari pihak donor dilangsungkan di Jakarta tanggal 2 Juni 2004. Pertemuan tersebut secara umum menyambut positif kemajuan ekonomi makro yang dicapai Pemerintah Indonesia, terutama dalam pencapaian target masa transisi setelah berakhirnya program IMF sebagaimana ditetapkan dalam *White Paper* (Inpres No.5/2003). Dalam pertemuan tersebut, pihak donor juga menegaskan kembali komitmen untuk menyediakan bantuan bagi Indonesia untuk Tahun Anggaran 2005. Pledge bantuan tersebut akan disampaikan secara formal pada Pertemuan CGI ke-14 pada bulan Januari 2005 di Jakarta.
223. Sementara itu, Indonesia juga melakukan kerjasama keuangan dalam kerangka internasional dengan berbagai lembaga dan forum-forum kerjasama keuangan multilateral, sebagaimana partisipasi Indonesia dalam Pertemuan *Spring Meeting* IMF/Bank Dunia dan Forum G-24 di Washington DC tanggal 24-25 April 2004, Pertemuan Tahunan IMF/Bank Dunia di Washington DC pada tanggal 2 Oktober 2004 dan Pertemuan Forum G-20 di Berlin tanggal 20-21 November 2004.
224. Kerjasama tersebut merupakan langkah penting untuk meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia, terutama dalam mendukung kepentingan negara berkembang dan kepentingan nasional, terhadap negara industri maju (G-7) dalam pengaturan rejim arsitektur keuangan global (*Bretton Woods*). Kerjasama terutama diarahkan untuk mendorong terciptanya keuangan internasional yang berkeadilan dan transparan, yang memungkinkan negara berkembang dapat menerapkan program penyesuaian struktural ekonominya; mewujudkan integrasi ekonomi dengan memperhatikan kepentingan pembangunan negara berkembang; dan mendorong reformasi arsitektur lembaga keuangan internasional yang mencerminkan realitas politik dan sosial serta mekanisme pengambilan keputusannya yang lebih demokratis.
225. Sebagai tindak lanjut pertemuan *Paris Club III* tahun 2002 mengenai pelaksanaan konversi utang (*debt swap*) untuk mengurangi beban utang luar negeri, Indonesia telah mengadakan kerjasama program *debt swap* dengan 3 negara yaitu Pemerintah Jerman di bidang pendidikan (Tahap I dan II masing-masing senilai Euro 25,5 juta), Pemerintah Inggris di bidang *Debt Conversion Scheme* (senilai 100 juta poundsterling) dan Pemerintah Perancis

(senilai USD 65 juta). Dalam tahun 2004, Indonesia telah mengadakan pendekatan intensif untuk mengadakan kerjasama *debt swap* dengan negara kreditor utama, yaitu pihak Italia dan Jerman (Tahap III di bidang lingkungan/kehutanan). Pendekatan tersebut sampai saat ini sudah dalam tahap penyusunan MoU.

226. Sehubungan dengan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Propinsi NAD dan Sumut tanggal 26 Desember 2004, sejumlah negara donor yang tergabung dalam keanggotaan *Paris Club* telah menawarkan untuk memberikan keringanan utang (*debt moratorium*) kepada negara-negara yang mengalami bencana alam tersebut, termasuk Indonesia. Untuk menjajagi tawaran tersebut, Pemri mengutus Menlu RI untuk mengadakan pertemuan dengan negara-negara yang telah mengindikasikan untuk memberikan *debt moratorium* kepada Indonesia, yaitu Perancis, Inggris, Italia dan Jerman pada tanggal 9-12 Januari 2005.
227. Dinamika hubungan antar bangsa yang demikian cepat telah memunculkan pelaku-pelaku baru di luar negara, khususnya LSM Asing / *International Non Governmental Organization* (INGO) yang turut mengambil peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan politik global. INGO dipandang sebagai fenomena baru di akhir abad 20, dengan jumlahnya yang telah melebihi 10 ribu organisasi, telah menembus batas wilayah negara dan telah menimbulkan perubahan signifikan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai negara. Dalam kaitan ini, mengingat Pemerintah Indonesia saat ini belum memiliki peraturan yang mengatur masuknya lembaga dan badan kerjasama asing termasuk LSM Asing di Indonesia, Departemen Luar Negeri berinisiatif menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Lembaga dan Badan Kerjasama Asing di Indonesia. Rancangan awal dari peraturan pemerintah tersebut pada prinsipnya berisi tentang tata cara pendaftaran, perpanjangan dan pencabutan ijin lembaga dan badan kerjasama asing di Indonesia. Karena keputusan tentang pemberian ijin bagi lembaga dan badan kerjasama asing di Indonesia memerlukan keterlibatan beberapa instansi maka dalam rancangan tersebut akan dibentuk Panitia yang terdiri dari unsur instansi/departemen teknis pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Pembahasan RPP tersebut diharapkan selesai pada paruh kedua tahun 2005.
228. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang dibentuk oleh PBB, selama 3 tahun terakhir ini Indonesia telah berupaya melakukan pengesahan terhadap Protokol Kyoto untuk Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (*Kyoto Protocol to the United Nations' Convention on Climate Change*) dan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati untuk Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (*Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*). Upaya tersebut akhirnya mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadikannya sebagai Undang-undang yang mempunyai arti penting dalam rangka menarik investasi baru melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism/CDM*). Kegiatan investasi tersebut diharapkan dapat memberikan dana tambahan sebagai kompensasi atas pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), karena proyek tersebut dilaksanakan pada sektor-sektor yang mampu menekan emisi atau meningkatkan penyerapan karbon. Sementara itu, mengingat besarnya konsentrasi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, Protokol Cartagena memiliki arti penting untuk melindungi kelestarian keanekaragaman hayati yang selanjutnya dapat dimanfaatkan

bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Protokol Cartagena juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk bekerjasama dengan berbagai negara atau pihak dalam upaya mengendalikan dampak negatif dari keberadaan Organisme Hasil Modifikasi Genetik (*Genetic Modified Organism/GMO*) dan atau *Living Modified Organism (LMO)*.

### III. DIPLOMASI PADA ISU-ISU SEKTORAL

229. Pelaksanaan kebijakan Diplomasi Perbatasan atau *Border Diplomacy* dikembangkan dalam rangka penetapan dan pengelolaan batas negara yang bersifat tiga dimensi: darat, laut dan udara sebagai suatu ruang kehidupan bersama bangsa Indonesia. Pada tahun 2004 mencatat beberapa perkembangan penting, antara lain perundingan delimitasi batas maritim RI-Malaysia pada bulan Juli 2004 (yang merupakan perundingan yang pertama sejak 30 tahun lalu) yang membahas *outstanding maritime borders* yakni batas laut wilayah, batas ZEE di Selat Malaka dan Laut China Selatan, serta batas laut wilayah, ZEE dan landas kontinen di Laut Sulawesi. Perundingan lainnya adalah dalam rangka delimitasi batas maritim RI-Filipina melalui *Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC)* dan *Sub Working Group on Delimitation of Common Maritime Boundaries*. Perundingan intensif juga dilakukan dalam rangka batas darat RI-Timor Leste yang menyepakati perjanjian sementara batas darat Indonesia-Timor Leste (*Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary*) atas sekitar 90% batas darat kedua negara. Dengan demikian perbatasan darat kedua negara diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Mengenai penetapan batas laut, kedua negara telah sepakat bahwa perundingan batas laut baru akan dilaksanakan setelah selesainya penetapan batas darat. Perundingan lainnya adalah dalam rangka penetapan batas darat RI-Malaysia di kawasan Kaltim-Sabah, serta rencana perundingan batas maritim RI-Singapura pada Februari 2005.

230. Dalam kaitan dengan kerjasama luar negeri oleh daerah, sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri berperan sebagai koordinator yang mengatur tertib hubungan antara Pemerintah Daerah dengan mitra luar negeri. Deplu juga merupakan saluran resmi atau pintu gerbang Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan luar negeri (*one door policy*), serta memberikan berbagai pertimbangan dari segi politik luar negeri atas rencana kerjasama daerah di segala bidang. Titik berat dari peran dan fungsi Departemen Luar Negeri tersebut diarahkan untuk menunjang suksesnya misi pemberdayaan potensi daerah, direalisasikan dalam kerangka hubungan luar negeri. Sehubungan dengan itu, telah terbit Keputusan Menlu No. SK.03/A/OT/X/2003/01 tanggal 29 Oktober 2003 mengenai "Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah". Hal ini merupakan suatu upaya untuk lebih meningkatkan mekanisme komunikasi, koordinasi, dan konsultasi yang efektif, efisien, terpadu, serta berkesinambungan antara Departemen Luar Negeri, dengan unsur-unsur daerah dalam kapasitasnya sebagai salah satu pelaku hubungan luar negeri.

231. Dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum khususnya kepada TKI, selama tahun 2004 Pemri telah mengadakan serangkaian perundingan untuk mewujudkan MoU, antara lain: antara RI dan Uni Emirat Arab (UAE) mengenai Penempatan TKI ke UAE yang menegaskan hak dan kewajiban TKI dan pengguna jasa; RI dan Malaysia mengenai Penempatan TKI di Sektor Formal ke Malaysia yang didasari oleh keinginan untuk menertibkan penempatan dan perlindungan TKI sektor formal di luar negeri; serta RI dan Korea Selatan tentang pengiriman TKI ke Korea Selatan yang mengatur proses rekrutmen, pengiriman dan pemulangan TKI.
232. Komitmen Indonesia dalam melaksanakan hukum internasional bagi kepentingan nasional ditunjukkan melalui cara: pertama, dengan mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian internasional; kedua, dengan melaksanakan perjanjian tersebut setelah melakukan pengikatan diri. Dalam kaitannya dengan pengikatan diri terhadap suatu perjanjian internasional, hingga saat ini Indonesia telah menjadi Pihak pada lebih dari 2600 perjanjian bilateral dan 225 perjanjian multilateral. Obyek perjanjian pun tersebar dari perjanjian yang bersifat politik keamanan hingga perjanjian ekonomi dan sosial budaya. Pada perjanjian-perjanjian yang secara prinsip penting, seperti Konvensi-konvensi mengenai Perburuhan, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup, Indonesia telah berupaya untuk melakukan pengikatan diri secara langsung melalui ratifikasi, penyetujuan/penerimaan dan aksesinya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
233. Upaya komunikasi dan membangun kemitraan telah dan akan terus dilaksanakan oleh jajaran Deplu pada semua tingkatan, baik pada tingkatan pimpinan maupun staf. Berbagai kegiatan, seperti *Foreign Policy Breakfast* telah dilaksanakan langsung oleh Menteri Luar Negeri guna mengkomunikasikan politik luar negeri RI ke berbagai kelompok masyarakat yang terkait seperti LSM, pemerhati lingkungan, kelompok pengusaha, tokoh-tokoh Islam dan lain-lain. Peningkatan komunikasi juga dilakukan melalui berbagai kegiatan seminar dan kuliah umum kepada mahasiswa dari berbagai universitas dan audiensi langsung kepada berbagai tokoh masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi wadah bagi peningkatan upaya memperkokoh kemitraan antara Deplu dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam rangka keberhasilan diplomasi total.
234. Pelaksanaan fungsi diplomasi publik Deplu telah diarahkan pula untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perjuangan diplomasi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan perjuangan fisik, khususnya di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam kaitan ini, selama tahun 2004 Deplu telah menempatkan penyelenggaraan seminar tahunan mengenang tokoh diplomasi sebagai salah satu kegiatan utama, seperti penyelenggaraan seminar tahunan mengenang tokoh diplomasi Dr. Mohammad Hatta pada tanggal 10 Agustus 2004 di Padang yang bekerjasama dengan Universitas Bung Hatta.
235. Deplu telah menyelenggarakan program “Duta Belia” bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang berjumlah 60 orang. Sebagaimana tahun sebelumnya, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembekalan di kelas dan kunjungan ke luar negeri yang dibagi dalam tiga segmen, yaitu pembekalan di Pusdiklat Deplu pada tanggal 21-22 Agustus 2004, pengukuhan Duta Belia Indonesia tahun 2004 oleh Menlu pada tanggal 23 Agustus 2004 dan kunjungan ke empat perwakilan di Australia yakni Canberra, Melbourne,

Sydney dan Perth pada tanggal 24-28 Agustus 2004. Diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

236. Merosotnya nilai-nilai Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin* dan anggapan Islam sebagai agama yang menghalalkan segala cara, telah mendorong Departemen Luar Negeri RI bekerjasama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (*International Conference of Islamic Scholars/ICIS*) di Jakarta, tanggal 23-25 Februari 2004. Konferensi bertema “Meneguhkan Kembali Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin*” tersebut bertujuan mengembangkan dan mengaktualisasikan Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin* serta membangun rasa saling percaya, pengertian dan menghormati antara Islam dan dunia lain, khususnya Barat. Selain itu, konferensi juga dimaksudkan untuk meningkatkan dialog yang konstruktif dan kerjasama diantara lembaga-lembaga dan masyarakat Islam dari seluruh kawasan.
237. Konferensi ICIS menghasilkan dua dokumen utama, yaitu: (i) Deklarasi Jakarta yang berisi pernyataan yang meneguhkan prinsip dan nilai-nilai Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin* dan (ii) Rencana Aksi yang memuat kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan ekonomi dan iptek, informasi dan media serta pendidikan dalam dua tahun ke depan. Untuk memberikan bobot pentingnya inisiatif ICIS dalam rangka mempererat kerjasama para cendekiawan Islam dan tindak lanjut kegiatan ke depan, Pemerintah RI telah meminta Sekretaris Jenderal OKI untuk mengesahkan hasil-hasil ICIS sebagai dokumen resmi OKI.
238. Sementara itu, Deplu juga memandang sentral kegiatan penggalangan publik di luar negeri, melalui peningkatan kontak langsung antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan yang dirancang lebih difokuskan pada upaya untuk mendorong adanya kemajuan “*people to people contact*” antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di negara lain. Dalam kaitan ini Deplu menyelenggarakan kegiatan *Interfaith Dialogue* yang telah dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 6-7 Desember 2004, yang merupakan hasil kerjasama dengan Kemlu Australia dan PP Muhammadiyah. Kegiatan ini merupakan pelengkap dari *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23-25 Pebruari 2004. Para peserta yang diundang berasal dari Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini dan Vietnam. Dialog ini bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama di kawasan regional, meningkatkan pengertian antara Islam sebagai agama yang dominan di Indonesia dengan agama lainnya serta memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada tingkat pemerintahan dan non-pemerintahan. Tema dari kegiatan ini adalah *Dialogue on Interfaith Cooperation: Community Building and Harmony*.
239. Pemberian beasiswa seni dan budaya bagi negara-negara anggota *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD) dan ASEAN dirasakan akan mendukung usaha membangun saling pengertian dan tali persahabatan antara masyarakat se-kawasan melalui pemahaman budaya. Keberhasilan program tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk kembali menyelenggarakan program yang berlangsung selama bulan September sampai dengan Desember 2004 yang diikuti oleh 27 peserta yang berasal dari 14 negara, yaitu Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea, Timor Leste, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Fiji. Para peserta mengikuti program

pembelajaran kesenian dan budaya Indonesia selama tiga bulan, yang dilaksanakan di tiga tempat yaitu: Sanggar Angklung Saung Mang Udjo, Bandung; Sanggar Seni Retno Aji Mataram, Yogyakarta; dan Sanggar Seni Taman Sari Bali.

240. Deplu juga telah melakukan berbagai penyempurnaan dalam hal pelayanan dan fasilitasi media sebagai bentuk konkrit dalam menjalin kemitraan dengan media, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai kebijakan luar negeri Indonesia kepada publik. Pelayanan informasi juga terus ditingkatkan melalui media lain yang diupayakan sendiri seperti peningkatan kinerja situs Deplu.
241. Untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal, berdasarkan Keppres No. 18/2003 tanggal 31 Maret 2003 (kemudian diubah dengan Keppres No. 103/2003 tanggal 17 Desember 2003), sejak tanggal 1 Februari 2004 Pemerintah RI telah memberlakukan kebijakan baru mengenai fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK). Kedua fasilitas ini berlaku bagi semua jenis paspor, semua keperluan dan berlaku paling lama 30 hari. Kebijakan BVKS didasarkan atas azas timbal balik, manfaat, dan tidak mengganggu keamanan dalam negeri. Fasilitas tersebut diberikan kepada 9 negara dan 2 wilayah, yaitu Brunei Darussalam, Chile, Filipina, Hongkong SAR, Macao SAR, Malaysia, Maroko, Peru, Singapura, Thailand, Vietnam. Sementara, kebijakan VKSK didasarkan atas azas manfaat dan tidak mengganggu keamanan dalam negeri dan diberikan kepada 21 negara dan 1 wilayah, yaitu Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Argentina, Brazil, Denmark, Finlandia, Hongaria, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Oman, Perancis, Polandia, Swiss, Selandia Baru, Taiwan, dan Uni Emirat Arab. Pemerintah RI juga telah membuat persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas secara bilateral dengan beberapa negara, yaitu Chile, India, Kamboja, Korea Selatan, Korea Utara, Kroasia, Kuba, Laos, Myanmar, Mongolia, Peru, Serbia Montenegro, Turki, dan Vietnam.
242. Dalam menangani masalah perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri mencanangkan konsep kepedulian dan keberpihakan terhadap semua masalah yang dihadapi WNI maupun BHI di luar negeri. Tantangan dalam menghadapi masalah perlindungan WNI dan BHI disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Tantangan internal antara lain berupa kendala finansial yaitu terbatasnya biaya operasional Perwakilan RI, sementara tantangan eksternal berupa hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kondisi politis, keamanan di negara tempat tujuan WNI sebagai akibat dari kebijakan suatu negara terhadap warga negara asing yang berdampak terhadap WNI ataupun yang disebabkan oleh persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat interaksi WNI di negara tujuan. Misalnya kasus pidana dan perdata yang dialami TKI, seperti perselisihan perburuhan berkenaan dengan upah yang tidak dibayar, penganiayaan, penyiksaan, dan pemerkosaan.
243. Pendekatan-pendekatan kepada pihak Malaysia dalam rangka penanganan pemulangan TKI-Bermasalah (TKI-B) dari Malaysia, sebagai dampak kebijakan untuk memulangkan PATI (Pekerja Asing Tanpa Ijin), telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Pendekatan di berbagai level dari tingkat Pejabat Tinggi sampai dengan Kepala Negara tersebut telah menghasilkan pemberian masa *amnesty* kepada para TKI-B dari tanggal 29 Oktober 2004 yang terus diperpanjang. Saat ini Tim Deplu yang tergabung dalam Tim

Koordinasi Pemulangan TKI-Bermasalah berkoordinasi dengan Malaysia mengenai persiapan pelaksanaan deportasi TKI-B. Pada prinsipnya Pemerintah RI akan tetap berpegang teguh pada pemulangan yang terkordinasi, aman, tertib dan lancar dengan memperhatikan HAM dan hak-hak melekat lainnya dari para TKI-B.

#### **IV. PEMANTAPAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI DEPLU**

244. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan hubungan antar negara, Indonesia memerlukan diplomat yang handal dan tangguh, profesional dan percaya diri untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum-forum bilateral, regional dan multilateral. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Departemen Luar Negeri telah melakukan langkah-langkah “benah diri” yang dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kapasitas “mesin diplomasi” Indonesia. Benah diri antara lain dilakukan dengan menata kelembagaan di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI serta melakukan pembenahan profesi diplomat. Langkah-langkah yang menjadi perhatian utama yaitu: meningkatkan profesionalisme dan keterampilan diplomat melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang diplomatik; dan melakukan *reward and punishment* dengan memperhatikan prestasi kerja, kinerja, keahlian, kemampuan dan perilaku diplomat.
245. Restrukturisasi perwakilan yang telah dimulai sejak Juni 2004 bertujuan untuk melakukan penajaman misi Perwakilan dalam upaya mencapai kepentingan nasional di negara akreditasi secara terfokus, efisien dan profesional. Penajaman misi perwakilan tersebut dilakukan melalui pengelolaan diplomasi yang lebih seimbang antara diplomasi bilateral, regional dan multilateral; mewujudkan Perwakilan RI yang lebih “mission oriented” dan ramping; penerapan pendekatan fungsional yang menggantikan pendekatan struktural; *rightsizing* berdasarkan indeksasi perwakilan serta bobot visi dan misi perwakilan; dan peninjauan wilayah rangkapan sehingga tercipta susunan organisasi perwakilan yang fleksibel dan ramping.
246. Sebagai upaya turut mendukung pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta kaitannya dengan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pada bulan Oktober 2004 Deplu menyelenggarakan Diklat Pembekalan Mengenai Hubungan Luar Negeri dalam rangka Otonomi Daerah Angkatan III. Diklat tersebut ditujukan bagi para Pejabat Pemda dan bertujuan untuk membantu Pemda dalam melaksanakan hubungan dengan pihak-pihak dari luar negeri. Dalam Diklat tersebut juga dibahas batas-batas yang menjadi kewenangan Pemda maupun pusat dalam melaksanakan hubungan luar negeri.
247. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara yang selama ini telah memiliki hubungan diplomatik cukup erat, Departemen Luar Negeri telah merencanakan untuk membuka sejumlah Kantor Perwakilan RI di luar negeri, baik pada tingkat Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal, antara lain Konsulat Jenderal RI di Kuching, Konsulat Jenderal RI di Shanghai, Konsulat Jenderal RI di Panama City, dan Konsulat Jenderal RI di Amsterdam.

248. Sebagai bagian dari implementasi Inpres No. 7 Tahun 1999, Deplu telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik di lingkungan Departemen maupun di seluruh Perwakilan RI di luar negeri. Kebijakan ini merefleksikan dukungan dan keseriusan Deplu untuk mempertanggungjawabkan serta meningkatkan kinerja kelembagaan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini juga merupakan tahapan penting menuju pembentukan lembaga pemerintahan yang akuntabel, baik di tingkat perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban publik. Deplu juga terus melakukan pengawasan terhadap unit kerja, baik di Pusat maupun di Perwakilan RI di luar negeri, dalam rangka menciptakan *clean and good governance*. Berbagai upaya telah dilakukan guna menghindarkan Deplu dan Perwakilan RI dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.
249. Sementara itu, evaluasi LAKIP seluruh Perwakilan RI dilakukan dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. Evaluasi LAKIP tersebut mencerminkan kinerja Perwakilan secara keseluruhan serta memberikan gambaran tentang hasil-hasil yang telah dicapai.
250. Dengan menyadari pentingnya peranan informasi dalam keberhasilan pelaksanaan operasional politik dan hubungan luar negeri, Departemen Luar Negeri senantiasa berupaya memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangannya. Dalam kaitan ini, Deplu telah memperkuat dan melengkapi infrastruktur jaringan komunikasi dan sistem informasi, seraya terus melakukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. Diharapkan pada gilirannya dapat diwujudkan suatu sistem *e-diplomacy* sebagai bagian integral dari sistem *e-government* di masa mendatang.

## **V. PROYEKSI DAN RENCANA KERJA TAHUN 2005**

251. Memasuki tahun 2005, pelaksanaan politik luar negeri akan dihadapkan kepada berbagai peluang dan tantangan yang bersumber dari lingkungan domestik, sub-kawasan, kawasan dan lingkungan global. Politik luar negeri akan tetap menjadi alat penting bagi pemenuhan kepentingan-kepentingan nasional yang kerangka, arah dan agendanya diselaraskan dengan prioritas-prioritas Kabinet Indonesia Bersatu menuju Indonesia yang lebih aman dan damai, demokratis, adil dan sejahtera, dengan senantiasa melakukan upaya peningkatan hubungan kerjasama internasional. Pelaksanaan politik luar negeri RI juga akan tetap berprinsip bebas dan aktif dengan menekankan pada langkah-langkah proaktif.
252. Berdasarkan hasil refleksi kinerja tahun 2004 dan dibandingkan dengan program kerja serta tantangan yang dihadapi tahun 2005, kiranya pelaksanaan politik luar negeri pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu akan lebih percaya diri.
253. Berbagai keberhasilan diplomasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yang diperkuat di dalam negeri oleh proses demokratisasi yang terus bergulir dan kinerja perekonomian yang makin mantap, merupakan modal kuat bagi Indonesia untuk lebih berperan aktif di dunia internasional.
254. Dengan modal kuat tersebut, tidak berarti Deplu akan lengah dalam menyongsong masa depan. Deplu perlu lebih menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas dan aktif,

mempertajam kerangka, arah dan agenda diplomasi Indonesia, serta terus melakukan benah diri dan penyempurnaan mesin diplomasi agar mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional sebagaimana digariskan dalam program kerja Kabinet Indonesia Bersatu tersebut di atas.

### **Tantangan dan Peluang Diplomasi 2005**

255. Pemajuan HAM dan demokratisasi, pemberantasan korupsi, penanganan masalah terorisme, pemajuan Islam berwajah *Rahmatan Lil 'Alamin*, penanganan masalah TKI/TKW, pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua dan otonomi daerah bagi provinsi-provinsi lainnya, pemulihan ekonomi dan pencapaian *Millenium Development Goals* Indonesia merupakan beberapa determinan domestik utama yang akan mempengaruhi performa politik luar negeri Indonesia di tahun 2005. Peran serta komponen-komponen masyarakat madani dalam hubungan luar negeri Indonesia melalui *Track II* juga akan tetap penting dan perlu terus diupayakan agar peran mereka bersinergi dengan langkah-langkah Pemerintah. Dalam upaya memerangi terorisme dan penanganan TKI/TKW, misalnya, peran masyarakat (*role of the public*) yang semakin besar akan semakin penting di tahun-tahun mendatang.
256. Upaya fasilitasi dan mobilisasi bantuan internasional bagi keperluan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Sumatra Utara akan menjadi prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2005. Kerjasama internasional di bidang penanganan bencana alam akan menjadi agenda yang semakin penting. Dalam kaitan ini, pada tanggal 6 Januari 2005 Indonesia telah menyelenggarakan KTT yang mengikutsertakan seluruh negara ASEAN, beberapa negara mitra dan wakil-wakil dari beberapa organisasi internasional. KTT telah mempererat solidaritas dan menghasilkan sejumlah komitmen bagi peningkatan kerjasama dalam penanganan bencana alam.
257. Untuk memajukan Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*, Indonesia akan terus mengupayakan tindak lanjut ICIS yang diselenggarakan bulan Februari 2004 untuk mempererat kerjasama para cendekiawan Muslim, termasuk di lingkungan OKI. Disamping itu, Indonesia juga akan menindak lanjuti hasil Dialogue on Interfaith Cooperation di Yogyakarta berupa pembentukan *Yogya International Center for Cultural and Religious Cooperation*. Pusat Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat citra Indonesia yang toleran dan memanfaatkan budaya Indonesia untuk memproyeksikan *soft-power* Indonesia yaitu kekuatan budaya dan agama yang moderat dan toleran (*empowering the moderates*).
258. Dalam rangka melindungi WNI/TKI di luar negeri, perlindungan sejak dini perlu dilakukan berupa pembenahan secara menyeluruh dan terpadu sejak hulu hingga hilir (mulai dari perekrutan, pengiriman, hingga pemulangan). Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga non-pemerintah (LSM) yang perduli pada masalah TKI, melalui forum bilateral, regional dan multilateral. Dengan demikian, keperdulian dan keberpihakan terhadap nasib WNI di luar negeri dapat benar-benar terpenuhi.
259. Prioritas lainnya di tahun 2005 adalah memagari potensi disintegrasi (yakni NKRI tetap tegak dan utuh, integrasi nasional kokoh, kedaulatan negara tegak dan separatisme senjata

dihentikan) melalui upaya penggalangan dukungan internasional terhadap kesatuan dan keutuhan negara dan bangsa melalui berbagai fora baik bilateral maupun internasional, penggalangan dukungan dari luar negeri terhadap kebijakan otonomi daerah dan otonomi khusus sebagai solusi terbaik, adil dan bermartabat dalam penyelesaian masalah Papua dan NAD.

260. Diplomasi juga akan diprioritaskan pada upaya-upaya memperkuat kapasitas nasional dalam rangka mengatasi ancaman terorisme, pemajuan HAM dan demokratisasi, harmonisasi norma-norma hukum internasional seperti tercantum dalam berbagai konvensi maupun perjanjian internasional dengan norma-norma hukum nasional, peningkatan kinerja ekspor, menarik investor, wisatawan, penyelesaian masalah hutang luar negeri, peningkatan upaya mewujudkan MDGs, serta mendorong alih teknologi, bantuan dana dan kerjasama teknik dalam kerangka mengalirkan sumber-sumber kemakmuran untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.
261. Indonesia percaya bahwa lingkungan yang kondusif dan kerjasama merupakan faktor konstruktif bagi pencapaian sasaran-sasaran politik luar negeri. Oleh karena itu, di tahun 2005 Pemerintah juga akan memberi perhatian lebih besar terhadap upaya menciptakan lingkungan luar wilayah terdekat serta lingkungan internasional yang aman, damai dan kondusif bagi upaya menciptakan perdamaian dan kemakmuran di dalam negeri, serta terhadap peningkatan kerjasama bilateral, regional dan internasional.
262. Di sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia terus mengantisipasi dampak lintas batas dari konflik-konflik internal yang terjadi di negara-negara di sub-kawasan. Dalam kaitan ini, di tahun-tahun mendatang agenda kerjasama ASEAN di bidang *conflict prevention* dan *conflict resolutions* akan semakin penting.
263. Terkait dengan ASEAN, Indonesia akan memberi perhatian, antara lain, terhadap langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan *Vientiane Action Programme* yang memuat berbagai strategi bagi realisasi *ASEAN Community*. Dalam konteks *ASEAN Security Community*, Indonesia akan terus mengembangkan kerjasama politik dan keamanan yang meliputi *political development, shaping and sharing of norms, conflict prevention, conflict resolution* dan *post-conflict peace building*. Indonesia juga akan terus mendorong semakin banyaknya jumlah negara yang mengaksesi TAC.
264. Di sub-kawasan Asia Timur, Indonesia mengantisipasi proses ke arah pembentukan Masyarakat Asia Timur. Sebagai komitmen yang sudah disepakati pada KTT ASEAN ke-10, Indonesia tidak bisa menghindari dari proses itu. Indonesia, bekerjasama dengan negara-negara ASEAN yang sehaluan (*like-minded*), akan terus mengupayakan suatu modalitas yang memuat parameter-parameter yang menjaga *the prominence of ASEAN* dalam proses tersebut.
265. Masih di sub-kawasan Asia Timur, masalah nuklir Korea Utara akan tetap menjadi *issue-area* yang mengemuka di tahun 2005. Politik luar negeri Indonesia terhadap masalah Korea menekankan pada langkah-langkah fasilitasi dan *engagement*. Pendekatan-pendekatan konstruktif yang lebih peka dan fleksibel perlu terus diupayakan dalam menyelesaikan masalah itu. Sementara itu, seperti yang disampaikan oleh pemerintah negara-negara

peserta Pertemuan Enam Pihak, peran Indonesia yang selama ini dimainkan mereka anggap masih sangat relevan dan penting. Dalam kaitan ini, sambil terus mencermati perkembangan, Indonesia akan terus menunjukkan komitmennya guna membantu andaikata diperlukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah nuklir Korea itu.

266. *Constructive engagement* dengan negara-negara di sub-kawasan Pasifik Barat Daya dan Pasifik Oseania akan tetap penting di tahun-tahun mendatang. Khusus dengan Timor Leste, perhatian khusus akan diberikan terhadap langkah bersama dalam implementasi prakarsa *Commission on Truth and Friendship*. Langkah bersama juga diperlukan untuk mendorong PBB dan masyarakat internasional menghormati dan mendukung prakarsa Indonesia-Timor Leste itu.
267. Isu-isu di sub-kawasan Asia Barat/Timur Tengah yang tetap menjadi agenda penting politik luar negeri RI di tahun 2005 adalah Irak dan Palestina. Seperti dalam *open-debate* di Dewan Keamanan PBB mengenai Irak, Indonesia akan terus menyerukan pentingnya stabilitas dan keamanan serta rekonstruksi bagi Irak. Bagi Palestina, baik dalam forum GNB maupun secara individual, Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan upaya perdamaian di Timur-Tengah. Program *post-conflict reconstruction*, termasuk *electoral assistance*, di Irak, khususnya dalam kerangka PBB, dan juga di Palestina, merupakan koridor aktifisme yang *viable* bagi langkah proaktif Indonesia terhadap kedua isu itu.
268. Selama tahun 2005, dalam kerangka kerjasama antar-kawasan, perhatian akan difokuskan pada pelaksanaan KTT Asia-Afrika dan Peringatan 50 Tahun KAA 1955 pada bulan April 2005. KTT yang bertema "*Reinvigorating the Bandung Spirit: Working toward a New Asian-African Strategic Partnership*" itu diharapkan dapat menghasilkan suatu komitmen dan kesepakatan bagi terwujudnya suatu kemitraan strategis baru Asia-Afrika. Serangkaian kegiatan yang akan mendahului KTT dan akan berlangsung sejak Februari 2005 mencakup *Asian-African Eminent Persons Roundtable*, *Asian Consultative Meeting*, *Asian-African SOM* dan *Asian-African Ministerial Meeting*.
269. Di tataran global, proses globalisasi dan berbagai dampaknya masih merupakan determinan penting bagi politik luar negeri RI. Agenda diplomasi *vis-à-vis* proses globalisasi itu akan terus menekankan pada upaya-upaya mendorong globalisasi yang inklusif dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Indonesia juga masih akan menghadapi kenyataan bahwa AS adalah satu-satunya negara adidaya yang dengan "*hard power*" dan "*soft power*"-nya mampu melakukan apa saja sesuai kepentingannya, termasuk melakukan langkah-langkah unilateralisme dan pre-emptif. Menghadapi kenyataan seperti itu, konsistensi dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif akan tetap dipertahankan.
270. Badan-badan internasional PBB dan non-PBB seperti GNB, OKI, Kelompok 77, D-8 dan Kelompok 15, akan tetap menjadi wahana penting bagi diplomasi multilateral Indonesia. Salah satu agenda penting di tahun 2005 adalah pembahasan-pembahasan di PBB terhadap berbagai rekomendasi yang tercantum dalam laporan *High-Level Panel on Threat, Challenges and Change*. Konsultasi-konsultasi di dalam negeri dan juga dengan negara-negara sehaluan akan terus ditingkatkan untuk menegaskan kembali serta menentukan sikap Indonesia terhadap rekomendasi-rekomendasi Panel itu, termasuk rekomendasi dua model dalam rangka reformasi DK PBB. Upaya penggalangan dukungan terhadap

pencalonan Indonesia untuk posisi anggota tidak tetap DK PBB periode 2007 – 2008 juga akan menjadi prioritas.

271. Perkembangan lingkungan global dan domestik serta meningkatnya aktifitas diplomasi RI di tataran bilateral, regional maupun multilateral, telah menuntut Deplu untuk melakukan benah diri. Tugas-tugas internal yang berkelanjutan guna mendukung peningkatan pelaksanaan diplomasi berkaitan dengan 'benah diri' tersebut akan terus mendapatkan perhatian utama. Sasaran-sasaran yang ingin dicapai kedepan adalah tertatanya kelembagaan di Departemen Luar Negeri dari segi struktur organisasi maupun hukum dan peraturan guna meningkatkan kinerja Deplu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menerapkan prinsip-prinsip *good-governance*, bentukan perwakilan yang *mission-oriented* hasil restrukturisasi perwakilan sehingga lebih mempertajam visi dan misi perwakilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pembentukan juga diarahkan pada peningkatan kinerja diplomat ke arah pembangunan etos kerja yang *product-oriented* atau *target-oriented*, menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan kompetensi dengan komitmen penuh untuk melaksanakan tiga tertib dan satu aman, yaitu tertib waktu, tertib administrasi, dan tertib fisik, serta aman personil, informasi dan gedung. Terjaminnya kesinambungan kebijakan 'benah diri' tersebut akan merupakan tantangan yang dihadapi pada tahun-tahun mendatang.